

Kode>Nama Rumpun Ilmu:597/Illmu Pemerintahan

**LAPORAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA
BIDANG PENELITIAN BIDANG ILMU**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDIDIKAN
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI KOTA DEPOK**

Tim Peneliti:
Siti Aisyah (Ketua)
aisyah@ut.ac.id
Ayi Karyana

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA
2013**

TALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA

Judul Kegiatan	: IMPLEMENTASI KEBERAKSIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI KOTA DEPOK		
Kode/Nama Rumpun Ilmu	: S97 / Ilmu Pemerintahan		
Ketua Peneliti			
A. Nama Lengkap	:	Dra. SITI AISYAH M.Si	
B. NIDN	:	0012066807	
C. Jabatan Fungsional	:	Lektor	
D. Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	
E. Nomor HP	:		
F. Surel (e-mail)	:	aisyah@stt.ac.id	
Anggota Peneliti (1)			
A. Nama Lengkap	:	AYU KARYANA M.Si	
B. NIDN	:	0017034106	
C. Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS TERBUKA	
Lama Penelitian Keseluruhan	:	1 Tahun	
Penelitian Tahun ke	:	1	
Biaya Penelitian Keseluruhan	:	Rp 15.000.000,00	
Biaya Tahun Berjalan	:	- dana dari ke Dikti	Rp 15.000.000,00
		- dana internal PT	Rp 0,00
		- dana institusi lain	Rp 0,00
		- total dari sumber	0



Depok, 11 - 12 - 2022,
Ketua Peneliti,

(Signature)
Dra. SITI AISYAH M.Si
NIDN/0012066807



Mengetahui,
Ketua LPPM

Dra. Dwi A. Pudro Puri, M.A., Ph.D.
NIP. 196107241987102001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
A. Sebaran Responden	26
B. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendidikan Di Kota Depok	28
C. Kualitas Layanan Pendidikan di Kota Depok	31
D. Kualitas Pelayanan	36
E. Pengaruh Implementasi Kebijakan Anggaran Pendidikan dan Kualitas Layanan Pendidikan di Kota Depok	36
BAB V KESIMPULAN	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
1. Angket	
2. Data Ordinal Variabel X	
3. Data Ordinal Variabel Y	
4. Biaya dan Jadwal Penelitian	
5. Justifikasi Anggaran	
6. Dukungan Sarana dan Prasarana	
7. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas	
8. Biodata ketua dan anggota	
9. Surat pernyataan ketua peneliti	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Dimensi Indikator	20
Tabel 2	Sebaran Instansi Layanan Pendidikan di Kota Depok	15
Tabel 3	Hubungan antara Komunikasi Organisasi dan Kualitas Pelayanan	36
Tabel 4	Uji Somers'D Komunikasi dengan Kualitas Pelayanan	37
Tabel 5	Hubungan Sumberdaya dengan Kualitas Pelayanan	38
Tabel 6	Uji Somers'D Dukungan Sumberdaya dan Kualitas Pelayanan	38
Tabel 7	Hubungan Sikap Pelaksana dengan Kualitas Pelayanan	39
Tabel 8	Uji Somers'D Sikap Pelaksana dengan Kualitas Pelayanan	40
Tabel 9	Hubungan Implementasi dengan Kualitas Pelayanan	40

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	25
Diagram 2	Masa Kerja	25
Diagram 3	Sebaran Tingkat Pendidikan	26
Diagram 4	Golongan Pangkat	26
Diagram 5	Persepsi Komunikasi Organisasi	28
Diagram 6	Persepsi terhadap Dukungan Sumberdaya	28
Diagram 7	Persepsi Terhadap Sikap	30
Diagram 8	Persepsi Tentang <i>Tangible</i>	32
Diagram 9	Persepsi tentang <i>Realibility</i>	32
Diagram 10	Persepsi tentang <i>Responsivness</i>	33
Diagram 11	Persepsi tentang <i>Assurance</i>	34
Diagram 12	Persepsi tentang Empati	34
Diagram 13	Kualitas Pelayanan Pendidikan	35
Diagram 14	Hubungan antara Komunikasi Organisasi dan Kualitas Pelayanan	36

RINGKASAN

Sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu mengucurkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan. Namun, dalam kenyataannya kebijakan bantuan dana yang diberikan pemerintah tersebut dinilai masih sangat kecil dan tidak memenuhi amanat konstitusi. UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002 telah mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Selain UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002, hal tersebut juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, yang berbunyi : “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Anggaran pendidikan sebesar 20% yang diambil dari APBN dan APBD ini dikenal dengan istilah Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penelitian ini bermaksud melihat sejauh mana pengaruh implementasi kebijakan anggaran pendidikan terhadap kualitas pelayanan pendidikan. Lokasi penelitian difokuskan di Kota Depok. Pemilihan lokasi Kota Depok didasarkan pada pertimbangan masih ada penduduk di Kota Depok yang buta huruf dan angka rata-rata lama sekolah (ARLS) meningkat dari tahun 2005 sebesar 10,64 menjadi 10,68 di tahun 2009 dan 10,69 pada 2010. Hal ini menunjukkan rata-rata penduduk Depok mengenyam pendidikan lebih dari 10 tahun atau setara dengan kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tujuan dari penelitian ini adalah (1). memperoleh pemahaman tentang komunikasi organisasi, sumber daya, dan sikap pelaksana yang merupakan dimensi dari implementasi kebijakan public (2). Memperoleh gambaran umum melalui hasil kajian dan analisis tentang implementasi kebijakan anggaran, dan pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan pendidikan. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah menambah khasanah kajian implementasi kebijakan publik atau kebijakan pemerintah pada umumnya. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi para praktisi, khususnya yang secara langsung menangani bidang kebijakan anggaran, seperti anggota legislatif dan eksekutif daerah.

Berdasarkan uji statistik diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa secara umum faktor implementasi kebijakan mempunyai hubungan negatif dengan pengaruh terhadap kualitas pelayanan pendidikan. Sedangkan secara parsial, faktor komunikasi organisasi dan sikap para pelaksana mempunyai hubungan positif, namun pengaruhnya tidak terlalu besar. Sedangkan dukungan sumber daya tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan. Secara umum, implementasi kebijakan anggaran tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelayanan pendidikan.

Keywords: komunikasi organisasi, sikap pelaksana, sumber daya, implementasi kebijakan, kualitas pelayanan pendidikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan enelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Anggaran Pendidikan Terhadap Kualitas Pelayanan di Kota Depok” tepat pada waktunya.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak laporan penelitian ini tidak dapat selesai tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini peneliti menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

- 1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka.
- 2) Kepala Pusat Keilmuan LPPM Universitas Terbuka.
- 3) Dekan FISIP, yang telah memberi ijin dan memberi kesempatan untuk melakukan penelitian.
- 4) Kepala Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Depok beserta stafnya yang telah meluangkan waktunya untuk keperluan penelitian ini.
- 5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (Ka. UPTD) Kecamatan Pancoran Mas, Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung Kota Depok, beserta stafnya yang telah membantu penelitian tersebut.
- 6) Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada peneliti sampai selesainya laporan penelitian ini, peneliti tidak lupa mengucapkan terimakasih.

Dengan segala kekurangannya semoga laporan penelitian ini bermanfaat. Peneliti memberi kesempatan luas dan terbuka bagi yang berkepentingan untuk memberikan kritik dan saran guna perbaikan hasil penelitian ini.

Tangerang Selatan, 15 Desember 2013

Tim Peneliti

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 31 Ayat (1) menjamin bahwa Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, lebih diperjelas lagi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, yang nantinya diharapkan pendidikan Nasional dapat tercapai.

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional dalam upaya memberikan layanan yang berkualitas, sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu mengucurkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan. Namun, dalam kenyataannya kebijakan bantuan dana yang diberikan pemerintah tersebut dinilai masih sangat kecil dan tidak memenuhi amanat konstitusi. UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002 telah mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Selain UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002, hal tersebut juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, yang berbunyi : “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Anggaran pendidikan sebesar 20% yang diambil dari APBN dan APBD ini dikenal dengan istilah Dana Alokasi Khusus (DAK).

Permasalahan yang muncul dan menjadi persoalan kebijakan dalam anggaran pendidikan dewasa ini adalah (1) kegagalan alokasi anggaran Prioritas anggaran terlalu banyak, sehingga kebutuhan dasar tidak terpenuhi; (2) kegagalan distribusi anggaran yang disebabkan data tidak valid di pusat; dan (3) kurangnya informasi akses anggaran bagi pemerintah daerah, serta kegagalan implementasi anggaran pelaksanaan program tidak sesuai dengan perencanaan dan panduan yang disusun. Permasalahan lainnya yang muncul perlu dibenahi sampai sekarang adalah masih buramnya kondisi pendidikan Indonesia sebagai akibat problem kebijakan yang telah diterbitkan. Kebijakan yang semula diarahkan untuk menyelesaikan aneka problem pendidikan yang ada, ternyata dalam substansi kebijakan tersebut terdapat problem tersendiri, bukannya masalah pelayanan pendidikan yang berkualitas terselenggara, yang terjadi justru masalahnya menjadi semakin kompleks.

Pada tahun 2005 Angka Melek Huruf (AMH) Kota Depok sebesar 97,98 dan meningkat di tahun 2009 menjadi 98,92, dan menjadi 99,10 pada 2010. Kendati nilai AMH cukup tinggi, angka ini menunjukkan bahwa masih ada 1.08% penduduk atau hampir 19 ribu penduduk Kota Depok yang buta huruf. Dari sisi lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah (ARLS) meningkat dari tahun 2005 sebesar 10,64 menjadi 10,68 di tahun 2009 dan 10,69 pada 2010. Ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Depok mengenyam pendidikan lebih dari 10 tahun atau setara dengan kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pada Tahun Ajaran 2011/2012 jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di Kota Depok sebanyak 357 sekolah, jumlah murid TK 16.828, dan 2.614 guru TK. Sekolah SD sebanyak 393 sekolah, dengan 153.890 murid dan 9.116 orang guru. Sekolah SMP berjumlah 162 sekolah dengan jumlah siswa 55.309 orang dan jumlah guru 3.526 orang. Di tingkat SMA terdapat 55 sekolah dengan jumlah murid dan guru masing-masing 17.535 orang dan 1.302 orang. Selain itu terdapat 97 sekolah SMK, dengan jumlah murid 34.534 orang dan jumlah guru 1.403 orang. Hasil Survei Susenas 2010, penduduk Kota Depok yang berumur 10 tahun keatas yang memiliki ijazah tertinggi SLTA dan sederajat 23,79%. Memiliki Ijazah tertinggi SLTA merupakan persentase terbesar dibanding jenjang pendidikan lainnya. Penduduk Kota Depok yang berumur 10 tahun ke atas yang

bisa membaca dan menulis huruf latin 55,03 %, huruf lainnya 0,18 %, huruf latin dan huruf lainnya 42,95 %, dan yang buta huruf 1,84 %.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendidikan Terhadap Kualitas Pelayanan di Kota Depok*.

Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang diungkap di atas sebagai latar belakang penelitian, maka peneliti dapat mengemukakan *Problem Statement* sebagai berikut : “*Implementasi Kebijakan Anggaran Pendidikan Terhadap Kualitas Pelayanan di Kota Depok belum efektif*, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan belum memenuhi harapan yang diinginkan. Dari *Problem Statement* ini, peneliti mengemukakan *research question* sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap kualitas pelayanan pendidikan dasar.
2. Seberapa besar pengaruh sumber daya terhadap kualitas pelayanan pendidikan dasar.
3. Seberapa besar pengaruh sikap pelaksana terhadap kualitas pelayanan pendidikan dasar.
4. Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan anggaran pendidikan terhadap kualitas pelayanan pendidikan.

Tujuan Penelitian

1. Memperoleh pemahaman tentang komunikasi organisasi, sumber daya, dan sikap pelaksana yang merupakan dimensi dari implementasi kebijakan publik.
2. Memperoleh gambaran umum melalui hasil kajian dan analisis tentang implementasi kebijakan anggaran, dan pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan pendidikan.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah kajian implementasi kebijakan publik dan atau kebijakan pemerintah dan ilmu administrasi negara pada umumnya.
2. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi para praktisi, khususnya yang secara langsung menangani bidang kebijakan anggaran, seperti anggota legislatif dan eksekutif daerah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu tugas Pemerintah adalah membuat kebijakan (*policy*). Pemerintah Daerah sebagai sub sistem dari pemerintahan nasional yang juga sebagai daerah otonom untuk dapat melaksanakan kegiatannya, berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan berbagai bidang kehidupan masyarakat yang telah diserahkan kewenangannya dari pemerintah pusat.

Fakta memperlihatkan, bahwa sebuah kebijakan yang sudah dirumuskan melalui mekanisme yang benar dan tepat, dan sudah sesuai dengan tata cara perumusan peraturan perundang-undangan, baik diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, masih terjadi menimbulkan kegagalan dalam penerapannya, antara lain jika proses implementasinya tidak tepat dan tidak cocok dengan kearifan lokal dan syarat dengan berbagai kepentingan yang mengiringi di belakang pembuatan kebijakan tersebut.. Bahkan sebuah kebijakan yang sudah maksimal disosialisasikan secara intensif, jika diimplementasikan secara tidak baik, terburu-buru dan terkesan dipaksakan, maka kebijakan tersebut akan gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa penerapan suatu kebijakan yang komprehensif dan matang dalam perumusannya, serta dengan cara yang tepat sasaran dan arif dan mengandung upaya menjaga kesejahteraan rakyat dapat dipastikan tujuannya akan tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan.

Friedrick (1963) memberikan batasan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Lasswell dan Kaplan (1970) memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Sedangkan Anderson (1979) mendefinisikan kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Kebijakan Publik merupakan terjemahan dari Public Policy. Istilah lainnya kebijakan negara, kebijakan pemerintah, dan kebijakan umum. Yang jelas di Indonesia, para pakar belum menyepakati suatu terminologi untuk *Public Policy*. Beberapa pengertian dapat dikemukakan di bawah ini:

1. Antar hubungan di antara unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya (Charles O. Jones dalam *An Introduction to the Study of Public Policy*, 1970).
2. Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (Thomas R. Dye dalam *Understanding Public Policy*, 1978).
3. Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (W. I. Jenkine dalam *Policy Analysis*, 1978).
4. Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat (Chief H.O Udoji dalam *The African Public Servant as a Public Maker, Public Policy in Africa, African Association for Public Administration and Management*, 1981).
5. Kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah (Anderson dalam *Public Policy Making*, 1979).
6. Apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Pemerintah, atau yang tidak dilakukan Ia adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud dan program-program pemerintah ... Bahan-bahan penting dari program-program Pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan (Edwards III dan Sharkansky dalam *The Policy Predicament*, 1978).
7. Suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan-artinya jika A dikerjakan pada waktu C-1 maka B akan dihasilkan pada waktu C-2 (Pressman dan Wildavsky juga dalam *A Implementation*, 1979).
8. Pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat (David Easton dalam *The Political System*, 1953).

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Kebijakan Publik (*public policy*) memiliki berbagai macam arti. Namun, umumnya kebijakan publik selalu dilandaskan kepada hukum, dan oleh karena itu bersifat otoritatif. Maka, secara sederhana kebijakan publik dapat diberi batasan sebagai keputusan yang bersifat otoritatif yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan, baik di dalam yurisdiksi nasional maupun lokal (daerah).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara konseptual kebijakan publik dapat diartikan sebagai keputusan-keputusan yang bersifat otoritatif yang dikeluarkan oleh pengelola pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan suatu daerah otonom. Kebijakan Publik yang dilakukan oleh Pemerintah dan Legislatif yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan menurut Simmons dalam Djopari (1997) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemuasan kepentingan umum;
2. Menetapkan proses administrasi yang tepat, dan
3. Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif.

Dalam menyoroiti kebijakan publik terdapat berbagai pendekatan. Ada sementara orang yang cenderung menitikberatkan perhatiannya pada kajian atas akibat-akibat dari suatu kebijakan dengan melakukan evaluasi terhadap akibat-akibat kebijakan tersebut dan apabila dianggap cukup rasional dan efektif memikirkan upaya-upaya untuk mengoptimalkannya. Misalnya, kajian terhadap akibat-akibat dari kebijakan publik di sektor publik seperti kebijakan pembebasan biaya pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), perubahan kurikulum, dan sebagainya.

Pemikiran lainnya memfokuskan perhatiannya pada faktor-faktor penyebab dari lahirnya kebijakan, dan selanjutnya mencermati proses formulasi dan implementasi kebijakan tersebut. Mengapa kebijakan itu dibuat, kelompok mana dan siapa saja aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan, apakah alternatif pemecahan masalah telah dirumuskan sesuai dengan kepentingan kelompok sasaran, siapa yang akan diuntungkan atau dirugikan dengan adanya alternatif kebijakan tersebut, apakah strategi atau pendekatan implementasi telah diidentifikasi dan dirumuskan dengan jelas, apakah koordinasi, jaringan kerja, dan instrumen pelaksanaan kebijakan telah dapat berjalan dengan baik. Kajian dan analisis seperti ini biasanya dilanjutkan untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan dari kebijakan itu. Apakah kebijakan itu dijalankan oleh aparat dengan baik dan konsisten, apakah terjadi penyimpangan dan kecurangan dalam pengimplementasiannya, apakah terdapat koordinasi dan keseriusan aparatur/pegawai dan *stakeholders* dalam mengoperasikannya, dan apakah terdapat intervensi atau dependensi pada pemerintah supra sistemnya, seperti yang

dilakukan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional. Hal ini dilakukan tentunya demi publik. Bukankah yang harus melakukan perlindungan dan menjaga keselamatan hidup masyarakat adalah pemerintah.

Kedua pandangan dan pemahaman di atas signifikan dengan problem penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Artinya, baik sudut pandang pertama yang menekankan pada akibat dari suatu kebijakan maupun sudut pandang kedua yang menitikberatkan pada pembentukan kebijakan dan implementasinya, secara faktual dijumpai dalam praktik pemerintahan daerah.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, Nugroho (2003) menawarkan dua pilihan langkah, yaitu: “ langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”. Agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realistis, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik.

Sehubungan dengan itu pula, Nugroho (2003) menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

Pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Kebijakan pada umumnya dirumuskan dengan strategi tersendiri yang menyangkut dengan pengambilan keputusan bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara dalam menjalankan misi pemerintah. Kebijakan biasanya dilakukan dengan bentuk kegiatan formal. Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

Begitu pentingnya implementasi sebuah kebijakan, maka persyaratan utama yang harus diperhatikan adalah bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu kebijakan mesti tahu apa yang mereka harus kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi mesti ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum dilaksanakan. Jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, ukuran implementasi mesti tidak hanya diterima, akan tetapi harus juga jelas.

Subarsono (2005) mengemukakan bahwa : “Aspek implementasi dalam proses kebijakan publik harus memperhatikan siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dan apa yang mereka kerjakan, serta apa dampak dari isi kebijakan itu”. Sementara Suharto (2005) menyatakan bahwa : “Implementasi kebijakan itu

merupakan proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil”. Untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sebuah Implementasi kebijakan, menurut Josy Adiwisatra dalam prolognya pada buku Tachjan (2006) sangat tergantung pada :

Keberhasilan mengidentifikasi jejaring kerja sama antar aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik itu, karena pada akhirnya aktor itulah yang akan melaksanakan apapun kebijakan publik yang dibuat. Karena itu, sejak tahapan formulasi kebijakan publik sudah harus diketahui secara pasti siapa yang berkepentingan, bagaimana interaksi antar aktor terbentuk, serta strategi apa yang digunakan untuk mencapai kepentingan itu.

Dari pandangan di atas, lebih menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya terletak pada kemampuan dari implementor atau pelaksana kebijakan, akan tetapi bagaimana para pembuat/penentu atau aktor kebijakan tersebut dapat bertanggung jawab sampai pada keberhasilan pelaksanaan implementasi setiap kebijakan yang dibuatnya.

Rohman (2002) mengemukakan paling tidak ada tiga kelemahan berkaitan dengan kebijakan pendidikan, yaitu: *elitisme* perumusan kebijakan yang cenderung bersifat *top-down* meskipun di era otonomi daerah, *distorsi* implementasi, serta keseluruhan prosesnya cenderung bersifat *instan*. Sehingga dikesankan oleh masyarakat terhadap seringnya perubahan kebijakan itu sebagai proses yang involutif semata.

Edwards III (1980) mengemukakan: “*In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?*” Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III (1980) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: “*Communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure*”.

1) Faktor Komunikasi (*Communication*).

Faktor komunikasi menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Artinya, komunikasi dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten. Tidak sempurnanya aspek komunikasi

dapat mengakibatkan para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan spesifik. Dengan demikian instruksi implementasi tidak ditransmisikan dan terdistorsi dalam proses transmisi. Inkonsistensi dapat mengakibatkan hambatan yang serius bagi implementasi kebijakan. Sebaliknya, petunjuk-petunjuk yang terlalu detail dapat menghambat implementasi kebijakan itu sendiri karena dipahami sebagai pembatasan kreativitas dan kemampuan beradaptasi.

2) Faktor Sumber Daya (*Resources*).

Sumber daya meliputi staf dalam ukuran yang tepat sesuai dengan keahlian yang diperlukan; informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi; muatan kewenangan dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan. Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia/aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dapat menjelaskan tesis bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efektif.

3) Faktor Sikap Pelaksana (*Dispositions*).

Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Para pelaksana tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan sering berhadapan dengan tugas-tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam lingkungan disposisi para pelaksananya. Jika para pelaksana mendapatkan disposisi yang baik terhadap kebijakan tertentu, mereka cenderung melaksanakannya di luar yang telah diharapkan pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan perspektif para pelaksana berbeda dari pembuat keputusan, proses implementasi kebijakan menjadi membingungkan.

Kesemua variabel tadi membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, dan menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Kognisi, netralitas, dan objektivitas para individu pelaksana sangat mempengaruhi bentuk respons mereka terhadap semua variabel tersebut. Wujud respons individu pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi kebijakan. Jika pelaksana tidak memahami tujuan kebijakan, lebih-lebih apabila sistem nilai

yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi tidak akan efektif.

Mengacu pada berbagai definisi kebijakan dan model implementasi kebijakan baik ditinjau dari segi wujud, proses maupun fungsi, maka untuk kepentingan penelitian sehubungan dengan teori yang digunakan untuk mempertegas variabel bebas (X) yakni: implementasi kebijakan Anggaran pendidikan, maka peneliti memilih teori implementasi kebijakan menurut Edwards III yang mengedepankan tiga faktor implementasi, yakni: 1) komunikasi (*communication*); 2) sumber daya (*resources*); dan 3) sikap pelaksana (*dispositions*).

Pemilihan terhadap teori Edwards III tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa secara substansial bahwa tiga faktor implementasi kebijakan menurut teori Edwards III tersebut diarahkan ke aparat birokrasi pemerintahan baik sebagai aktor maupun sebagai implementor kebijakan. Dengan demikian teori ini relevan dengan objek penelitian menyangkut kebijakan anggaran pendidikan, yang aktor dan implementor kebijakannya adalah didominasi oleh aparatur pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Oleh karena itulah, maka peneliti memandang bahwa Teori Edwards III tersebut relevan dengan *locus* dan *focus* yang diteliti.

Pelayanan Publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena hal ini bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan faktual masyarakat terhadap peranan pemerintah. Filosofi pelayanan publik seharusnya menempatkan rakyat sebagai subyek dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Moralitas dari pelayanan publik merupakan derivasi dari filosofi tersebut, yaitu pemberdayaan rakyat dalam relasinya dengan struktur kekuasaan.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, pemerintah hendaknya selalu berorientasi pada masyarakat, dengan menerapkan konsep pelayanan yang berwawasan masyarakat (*community-based service*). Menurut Sianipar (1999) konsep pelayanan yang berwawasan masyarakat adalah “suatu pemikiran, perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan yang berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan, keperluan dan kepentingan masyarakat”. Jadi fokus pelayanan adalah masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang yang profesional dalam memberikan pelayanan maka aparatur negara harus memiliki

kemampuan dan pengetahuan tentang bidang tugas masing-masing sebagaimana dinyatakan bahwa pelayanan profesional adalah kemampuan seseorang yang memiliki profesi melayani kebutuhan orang lain atau profesional menanggapi kebutuhan khas orang lain.

Zeithaml, et al. (1990), menyatakan bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh dua hal, yaitu *Expected service* dan *Perceived service*. *Expected service* dan *Perceived service* ditentukan oleh *Dimension of service quality* yang terdiri dari sepuluh dimensi, yaitu : *tangible* (terjamah), *reliability* (handal), *responsiveness* (tanggap), *competence* (kompeten), *courtesy* (ramah), *credibility* (dapat dipercaya), *security* (aman), *access* (akses), *communication* (komunikasi), *understanding the customer* (memahami pelanggan). *Expected service* (pelayanan yang diharapkan) dipengaruhi oleh *word of mouth* (kata yang diucapkan), *personal need* (kebutuhan personal), *past experience* (pengalaman masa lalu), dan *external communication* (komunikasi eksternal).

Kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat pengguna serta ketepatan penyampaianya untuk mengimbangi apa yang diharapkan masyarakat pengguna. Baik atau buruknya kualitas jasa tergantung dari kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan masyarakat pengguna secara konsisten dan berakhir pada persepsi masyarakat pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas yang baik bukanlah diukur atau dirasakan oleh penyedia jasa layanan, namun dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan tersebut.

Untuk melihat pelayanan itu berkualitas dan memenuhi keinginan pelanggan atau masyarakat, mempunyai cara-cara tertentu, antara lain seperti yang dinyatakan Kotler (1996), bahwa cara mengamati dan mengukur kepuasan pelanggan adalah dengan sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan, pengamatan pada kepuasan pelanggan. dengan demikian fokus pada kebutuhan/ keinginan masyarakat diartikan sebagai orientasi pemerintah terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat atas layanan yang diinginkan masyarakat.

Dari kesepuluh dimensi kualitas pelayanan, kemudian Zeithaml, et al (1990), menyederhanakan menjadi lima dimensi yang dinyatakan dengan *SERVQUAL Dimensions*, yaitu:

1. *Tangibles* (kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi, dan sebagainya);
2. *Reliability* (kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya);
3. *Responsiveness* (kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen);
4. *Assurance* (kemampuan dan keramahan, serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen);
5. *Emphaty* (sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen).

Dengan mempelajari konsep *service quality* yang diketengahkan oleh Zeithaml, et al. pertanyaan yang muncul apakah konsep tersebut dapat diaplikasikan untuk mengukur kualitas pelayanan pada sektor publik? Penulis berkeyakinan bahwa pengukuran kualitas pelayanan pada organisasi publik dengan menggunakan indikator-indikator *service quality* dapat dilakukan dengan syarat dilakukan modifikasi dari beberapa item (dari 22 item pertanyaan dalam *service quality*) dalam atribut-atribut *service quality* yang disesuaikan dengan kondisi organisasi sektor publik. Keyakinan tersebut ditunjang oleh pernyataan Zeithaml (1990), pada halaman pengantar dari bukunya, bahwa metode *service quality* yang ditulis dalam buku tersebut dapat digunakan dan dipraktekkan untuk semua tipe pelayanan organisasi yang berorientasi profit maupun bukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa untuk mengukur kualitas pelayanan publik tidak cukup hanya menggunakan indikator tunggal, tetapi harus menggunakan *multi-indicator* dari aspek proses pelayanan dan aspek *output* atau hasil pelayanan. Dari sekian banyak indikator tersebut, kesemuanya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu indikator kualitas pelayanan yang berorientasi pada proses dan indikator yang berorientasi pada hasil.

Untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan dasar, peneliti menggunakan konsep Zeithaml, et al. (1990), yang memiliki lima dimensi, yaitu: Keandalan (*reliability*), Ketanggapan (*responsiveness*), Keyakinan/jaminan (*assurance*), Empati (*emphaty*), dan Berwujud (*tangible*). Kualitas pelayanan pendidikan dasar dalam penelitian ini diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan

kegiatan dari suatu sistem pelayanan pendidikan dasar dalam merespons dinamika yang terjadi dalam masyarakat secara tepat dan efisien.

Dari sisi layanan pendidikan, selama kurun waktu 4 tahun dari tahun 2006 sampai dengan 2009 telah terbangun 5 (lima) sekolah baru, terehabilitasi 87 sekolah, dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) 77 unit, dan pada tahun 2010 sedang dalam proses pembangunan RKB 9 (Sembilan) unit, proses rehabilitasi gedung sekolah 3 unit, proses pembangunan sekolah baru 2 (dua) unit, demikian pula untuk memberikan kesempatan yang luas dalam mengakses pendidikan pada tahun 2010 telah dibuka pengembangan 5 (lima) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka dan 1 (satu) SMU Terbuka. Hal lainnya adalah alokasi anggaran pendidikan yang terus meningkat sejak tahun 2006 Rp 143,4 Milyar hingga tahun 2009 mencapai Rp 252,5 Milyar (20%), pembebasan biaya sekolah dasar negeri serta beasiswa Rp 10,000 bagi seluruh siswa tingkat Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), sampai SMA negeri maupun swasta.

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kajian pustaka, peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Besarnya pengaruh implementasi Kebijakan Anggaran pendidikan terhadap kualitas pelayanan pendidikan ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, dan sikap pelaksana.
2. Besarnya pengaruh komunikasi terhadap kualitas pelayanan pendidikan ditentukan oleh transmisi, konsistensi, dan kejelasan komunikasi.
3. Besarnya pengaruh sumber daya terhadap kualitas pelayanan pendidikan, ditentukan oleh keadaan staf, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas.
4. Besarnya pengaruh sikap pelaksana terhadap kualitas pelayanan pendidikan, ditentukan oleh perilaku dan insentif.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Variabel dan Instrumen

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas Implementasi Kebijakan Anggaran Pendidikan (*independent variable*) dengan simbol X dan variabel terikat (*dependent variable*) dengan simbol Y, yakni Kualitas Pelayanan Pendidikan.

Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis tingkat keterpengaruhan variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Untuk itulah, penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan metode *eksplanatori survey*, yakni menjelaskan dan menganalisis besarnya pengaruh implementasi kebijakan anggaran pendidikan terhadap kualitas pelayanan pendidikan baik secara parsial maupun secara utuh pengaruh dari faktor-faktor implementasi kebijakan tersebut.

Pertimbangan mendasar penelitian ini dilakukan dengan desain kuantitatif, adalah bahwa faktor-faktor implementasi kebijakan, yakni: komunikasi, sumberdaya, dan sikap pelaksana, berikut indikatornya dapat diukur dengan menggunakan bantuan statistik. Untuk selanjutnya data hasil penelitian tersebut diuji sesuai tidaknya dengan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, sebagaimana pula sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Agar keberadaan data penelitian yang diperoleh dapat digunakan sebagai ukuran besaran pengaruh dari setiap variabel penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan pengujian kausalitas dari faktor-faktor implementasi pada variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Pengolahan data dilakukan dengan prinsip statistik dengan bantuan SPSS. Dengan teknik *path analysis* akan diketahui besaran pengaruh variabel X terhadap Y baik secara total maupun secara parsial.

Tabel 1
Dimensi dan Indikator
Implementasi kebijakan anggaran pendidikan dan Kualitas Pelayanan

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan Anggaran Pendidikan (X)	Komunikasi antar organisasi (X_1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan program sosialisasi ▪ Kesesuaian isi pesan sosialisasi ▪ Kejelasan pesan ▪ Kualitas media sosialisasi ▪ Kualitas koordinasi antar lembaga ▪ Kecocokan sistem koordinasi
	Sumber daya (X_2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecukupan jumlah sarana dan prasarana ▪ Dampak sarana dan prasarana ▪ Kecukupan jumlah dana ▪ Dampak dana terhadap tugas ▪ Upaya memenuhi kebutuhan tugas ▪ Kecukupan jumlah personal ▪ Upaya memenuhi keterbatasan personal
	Sikap Pelaksana (X_3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengetahuan pelaksana anggaran pendidikan ▪ Pemahaman pelaksanaan anggaran pendidikan ▪ Motivasi pelaksana anggaran pendidikan ▪ Tujuan individu pelaksana anggaran pendidikan ▪ Keinginan pelaksana anggaran pendidikan
Kualitas Pelayanan (Y) (Zeithaml, 1990: 26)	Berwujud (<i>Tangibles</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan sarana prasarana ▪ Lokasi strategis ▪ Kenyamanan ruangan ▪ Kecukupan petugas ▪ Kebersihan
	Kehandalan (<i>Reliability</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tepat waktu ▪ Kesesuaian prosedur ▪ Kesetaraan/perlakuan sama dari petugas ▪ Kesederhanaan ▪ Ketepatan
	Ketanggapan (<i>Responsiveness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketanggapan kebutuhan pelanggan ▪ Penerimaan kritik dan saran ▪ Penuh perhatian ▪ Kemudahan ▪ Memiliki pengetahuan yang memadai
	Keyakinan/jaminan (<i>Assurance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keamanan ▪ Kepastian hukum ▪ Kepercayaan ▪ Tanggung jawab ▪ Kejelasan petunjuk pelayanan
	Empati (<i>Empathy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemahaman kebutuhan pelanggan ▪ Keinginan membantu pelanggan ▪ Kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan ▪ Kepedulian dengan pelanggan ▪ Keinginan menindaklanjuti kritik

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Analisis validitas instrumen penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan mampu mengukur obyek yang diukurnya, untuk itu sebuah alat ukur dikatakan valid apabila alat tersebut mampu mengukur obyek yang diukurnya. Oleh karena itu untuk mengukur validitas instrumen, penulis menggunakan validitas internal yaitu berupa uji validitas dengan menganalisis butir pada masing-masing variabel (analisis pada tiap variabel secara terpisah).

Langkah-langkah dalam menganalisis tiap butir pada masing-masing variabel sebagai berikut :

1. Skor butir pertanyaan dipandang sebagai nilai X dan skor total dipandang sebagai nilai Y;
2. Menganalisis butir-butir pernyataan dalam angket dengan skor total menggunakan Uji Statistik Somers' D

Uji Reliabilitas angket dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi instrumen angket sebagai alat ukur, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama (homogen) diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparatur dan pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Depok. Populasi pegawai sejumlah tersebut terdiri dari : pegawai yang bekerja di Unit Dinas Pendidikan, Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di setiap Kecamatan di Kota Depok.

Tabel 2
Sebaran Instansi Layanan Pendidikan di Kota Depok

Nomor	Instansi
1.	Dinas Pendidikan Kota Depok
2.	Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kec. Sawangan
3.	Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kec. Bojong Sari
4.	Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kec. Pancoran Mas

5.	Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kec. Cipayung
6.	Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kec. Sukmajaya
7.	Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kec. Cilodong
8.	Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kec. Cimanggis
9.	Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kec. Tapos
10.	Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kec. Beji
11.	Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kec. Limo
12.	Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kec. Cinere

Sumber: Pemda Kota Depok (2013).

Atas dasar pertimbangan keterbatasan waktu dan biaya dalam penelitian karena besarnya ruang lingkup populasi sasaran yang diteliti maka besarnya sampel didasarkan pada pendapat Slovin (*dalam* Umar, 1998) dengan mengambil persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan yaitu 10 %.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan menentukan sebanyak 5 instansi penyedia layanan pendidikan di Kota Depok, yaitu Dinas Pendidikan Kota Depok, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kec. Bojong Sari, Sawangan, Pancoran Mas, dan Cipayung. Dinas Pendidikan mewakili pelaksana kebijakan di tingkat kota, sedangkan UPT kecamatan dipilih berdasarkan kecamatan di Kota (Pancoran Mas), kecamatan menengah (Sawangan dan Bojong Sari), dan kecamatan pinggiran (Cipayung).

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui survei dengan menggunakan alat pengumpul data berupa angket dengan jawaban yang telah dikategorikan dalam bentuk angka, mengikuti skala likert. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Angket; teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan yang bersifat tertutup, yang setiap pertanyaan sudah disediakan alternatif jawaban, sehingga responden hanya memilih salah satu jawaban yang dianggap sesuai dengan kenyataan. Pengukuran data dilakukan dengan menggunakan skala Likert yang telah dimodifikasi. Angket disusun berdasarkan urutan variabelnya masing-masing jawaban yang menurut responden paling tepat, dipilih dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia. Penilaian atas pilihan jawaban

untuk angket yang disediakan adalah sebagai berikut :

- Sangat Baik/sangat memuaskan/sangat sesuai/sangat paham, diberi skor 4.
 - Baik/memuaskan/sesuai/paham, diberi skor 3.
 - Cukup baik/cukup memuaskan/cukup sesuai/cukup paham/cukup setuju, diberi skor 2.
 - Tidak Baik/kurang baik/kurang memuaskan/kurang sesuai/kurang paham diberi skor 1.
2. Studi Dokumentasi dan kepustakaan; teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, baik yang sifatnya kajian teoritik maupun dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis jalur (*path analysis*). Metode ini digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel implementasi kebijakan anggaran terhadap kualitas pelayanan pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Depok. Untuk mengetahui sifat hubungan antara variabel X1, X2, dan X3, serta variabel X dengan Y dilakukan analisa Crosstab dan uji statistik Somers'd. Untuk penggunaan teknik analisis jalur digunakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menentukan f (frekuensi) responden yaitu banyaknya responden yang memberikan respons untuk masing-masing kategori yang ada.
2. Membagi setiap bilangan pada f dengan banyaknya responden total, sehingga diperoleh proporsi.
3. Menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap respons sehingga keluar proporsi kumulatif. Proporsi kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku.
4. Menggabungkan nilai kategori berdasarkan proporsi kumulatif serta menginterpretasikan data yang ada di crosstbs antara variabel X dan Y
5. Menginterpretasikan Value berdasarkan uji statistik Somers'd.

Keseluruhan proses analisa data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS, yang selanjutnya hasil output data diinterpretasikan dan dianalisa untuk menghasilkan kesimpulan.

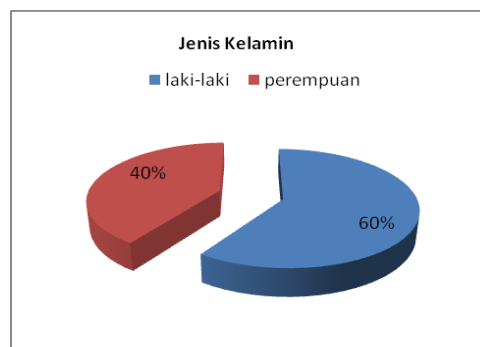
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

F. Sebaran Responden

a. Jenis Kelamin

Sebaran pegawai Dinas Pendidikan Pemkot Depok berdasarkan jenis kelaminnya 60% perempuan dan 40% laki-laki.

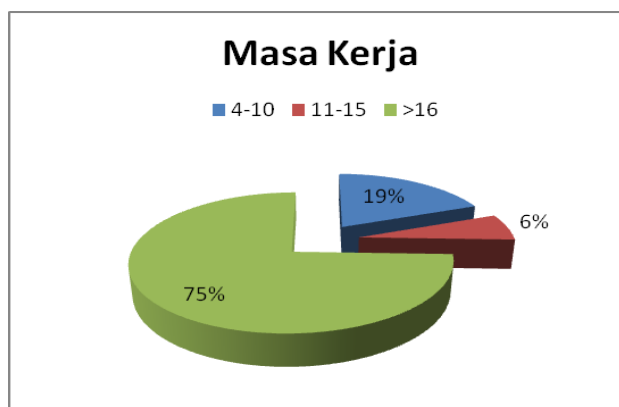
Diagram 1: Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



b. Masa Kerja

Berdasarkan masa kerjanya, 75% pegawai Dinas Pendidikan Pemkot Depok memiliki masa kerja lebih dari 16 tahun, 19% memiliki masa kerja 4-10 tahun, sedangkan sisanya 6% memiliki masa kerja antara 11-15 tahun.

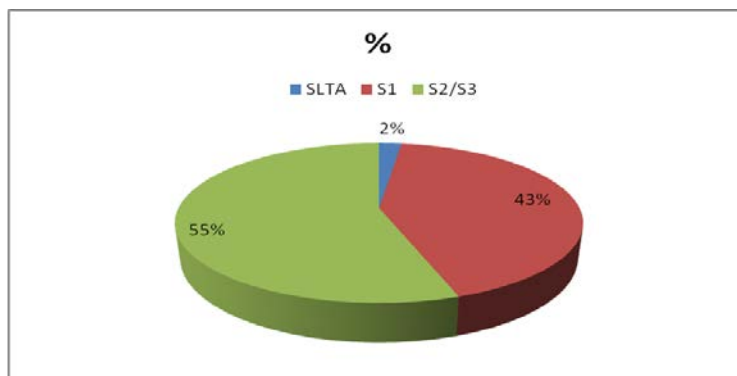
Diagram 2 : Masa Kerja



c. Pendidikan

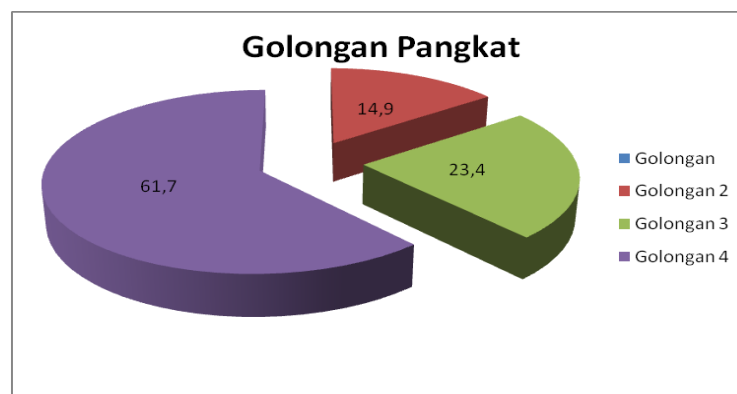
Diagram 3 menunjukkan sebaran tingkat pendidikan pegawai Dinas Pendidikan Pemkot Depok. Pegawai yang berpendidikan pascasarjana sebanyak 55%, yang berpendidikan S1 sebanyak 43% dan hanya 2% yang masih berpendidikan SLTA. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pendidikan Pemkot Depok mayoritas sudah mengenyam pendidikan sarjana.

Diagram 3: Sebaran Tingkat Pendidikan



d. Pangkat/Golongan

Diagram 4 : Golongan Pangkat



Golongan pangkat pelaksanaan kebijakan mayoritas sudah mencapai Golongan Pangkat 4, yakni sebesar 61,7%, Golongan 3 sebesar 23,4% dan hanya 14,3% yang Golongan Pangkatnya 2.

Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaksana kebijakan adalah perempuan, mempunyai masa kerja lebih dari 16 tahun, berpendidikan S2 dan mempunyai golongan pangkat 4.

G. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendidikan Di Kota Depok

Edwards III (1980) menawarkan dan mempertimbangkan beberapa faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, diantaranya adalah komunikasi, dukungan sumber daya, dan sikap pelaksana. Berikut adalah persepsi para pelaksana kebijakan anggaran pendidikan.

a. Persepsi Pelaksana Kebijakan Terhadap Komunikasi Antar Organisasi

Menurut Edward III, faktor komunikasi mempunyai peranan dalam memberikan acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Artinya, komunikasi dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten. Tidak sempurnanya aspek komunikasi dapat mengakibatkan para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan spesifik. Dengan demikian instruksi implementasi tidak tertransmisikan dan terdistorsi dalam proses transmisi. Inkonsistensi dapat mengakibatkan hambatan yang serius bagi implementasi kebijakan. Sebaliknya, petunjuk-petunjuk yang terlalu detail dapat menghambat implementasi kebijakan itu sendiri karena dipahami sebagai pembatasan kreativitas dan kemampuan beradaptasi.

Diagram 5 menggambarkan persepsi pelaksana kebijakan mengenai komunikasi yang berlangsung di dalam organisasi penyedia layanan pendidikan di Pemkot Depok. Mayoritas pelaksana menyatakan bahwa komunikasi di dalam organisasi penyedia layanan pendidikan berlangsung dengan baik (96%) dan hanya 4 % yang menyatakan komunikasi berlangsung buruk.

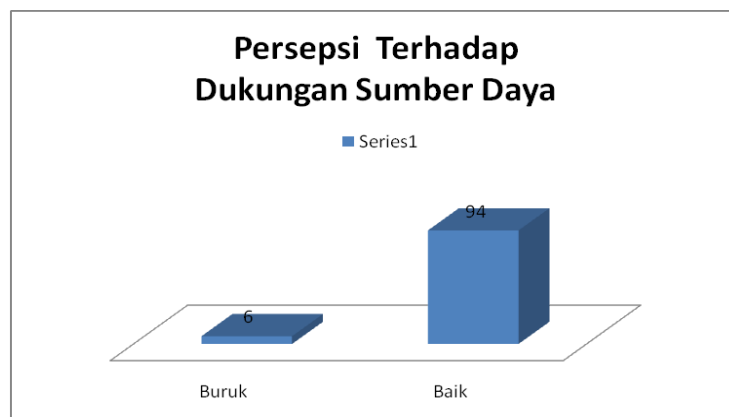
Diagram 5: Persepsi Komunikasi Organisasi



b. Persepsi Terhadap Dukungan Sumber Daya

Menurut Edward III, faktor lain yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan adalah dukungan sumber daya. Sumber daya dapat diartikan sebagai ketersediaan staf yang tepat sesuai dengan keahlian yang diperlukan; informasi yang cukup dan relevan kewenangan yang dimiliki dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau yang dipergunakan dalam memberikan pelayanan. Sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efektif.

Diagram 6: Persepsi terhadap Dukungan Sumberdaya



Persepsi para pelaksana kebijakan anggaran pendidikan mengenai ketersediaan sumber daya yang ada digambarkan pada Diagram 6. Mayoritas pelaksana kebijakan menyatakan bahwa pemerintah menyediakan sumberdaya dengan baik (94%), dan hanya 6% yang menyatakan sumberdaya yang ada buruk. Pendapat ini diperkuat oleh data sumber daya manusia yang dimiliki Pemkot Depok yang mayoritas telah mengenyam pendidikan S2 dan memiliki masa kerja lebih dari 16 tahun.

c. Persepsi Terhadap Sikap Pelaksana

Menurut Edward III, faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Lebih lanjut Edward III menyatakan jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Para pelaksana tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan sering berhadapan dengan tugas-tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam lingkungan disposisi para pelaksananya. Jika para pelaksana mendapatkan disposisi yang baik terhadap kebijakan tertentu, mereka cenderung melaksanakannya di luar yang telah diharapkan pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan perspektif para pelaksana berbeda dari pembuat keputusan, proses implementasi kebijakan menjadi membingungkan.

Berikut adalah persepsi pelaksana kebijakan mengenai sikap mereka terhadap kebijakan anggaran pendidikan di Pemkot Depok yang digambarkan dalam Diagram 7.

Diagram 7: Persepsi Terhadap Sikap

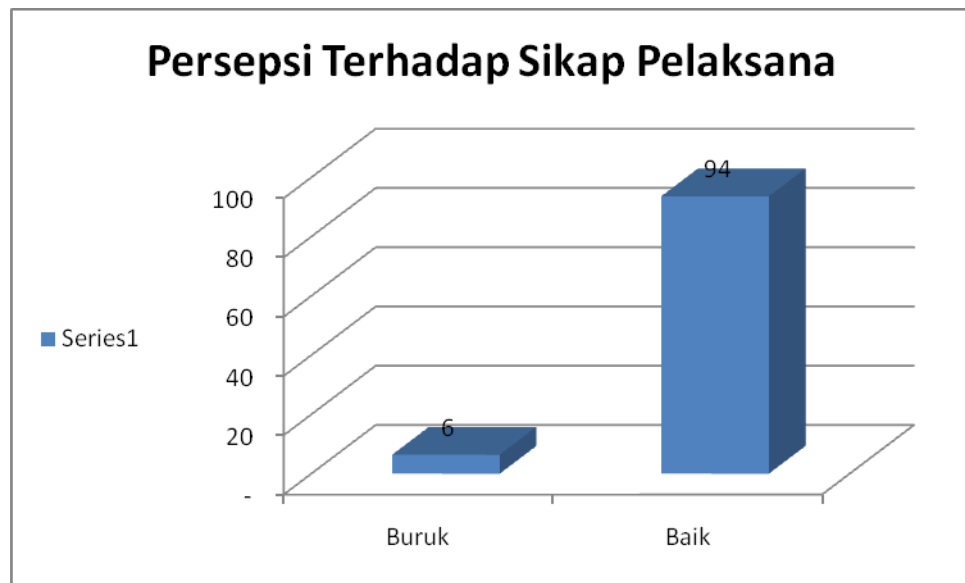


Diagram 7 menunjukkan bahwa mayoritas pelaksana kebijakan menyatakan sikap pelaksana berada pada kategori baik (94%) dan hanya 6% yang menyatakan sikap pelaksana berada pada kategori buruk.

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan di atas, yakni berturut-turut persepsi pelaksana tentang komunikasi organisasi, dukungan pemerintah terhadap ketersediaan sumberdaya, dan sikap pelaksana maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan anggaran pendidikan di Pemkot Depok berjalan dengan baik. Berdasarkan perhitungan statistik, maka secara umum persepsi pegawai terhadap implementasi kebijakan anggaran pendidikan digambarkan tidak mengalami hambatan yang berarti.

H. Kualitas Layanan Pendidikan di Kota Depok

Pelayanan Publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena hal ini bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan faktual masyarakat terhadap peranan pemerintah. Untuk melihat pelayanan itu berkualitas dan memenuhi keinginan pelanggan atau masyarakat, mempunyai cara-cara tertentu, antara lain seperti yang dinyatakan Kotler (1996), bahwa cara mengamati dan mengukur kepuasan pelanggan adalah dengan sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan, pengamatan pada kepuasan pelanggan. dengan

demikian fokus pada kebutuhan/ keinginan masyarakat diartikan sebagai orientasi pemerintah terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat atas layanan yang diinginkan masyarakat.

Zeithaml, et al (1990), menyederhanakan dimensi pelayanan menjadi lima aspek yang dinyatakan dengan *SERVQUAL Dimensions*, yaitu: *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *responsiveness*, dan *emphaty*.

1. *Tangibles* (kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi, dan sebagainya);
2. *Reliability* (kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya);
3. *Responsiveness* (kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen);
4. *Assurance* (kemampuan dan keramahan, serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen);
5. *Emphaty* (sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen).

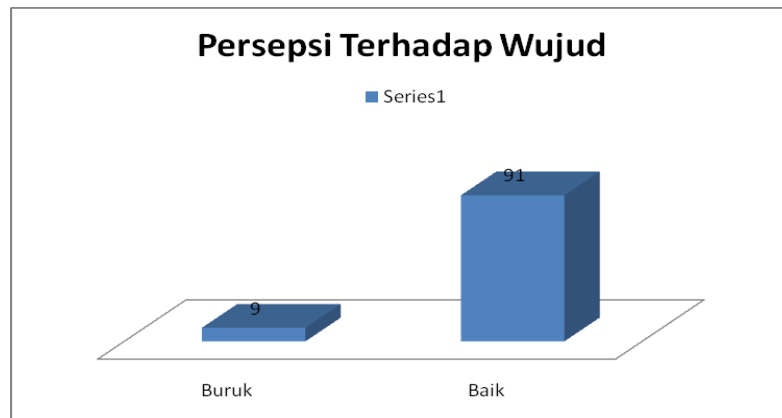
Berikut adalah persepsi pengguna layanan pendidikan terhaap kelima dimensi pelayanan di Pemkot Depok.

a. Persepsi tentang *Tangibles*.

Zeithaml, et al (1990), mengartikan *tangibles* sebagai kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi, dan sebagainya.

Berikut adalah persepsi pengguna layanan pendidikan di Pemkot Depok mengenai *tangibles*.

Diagram 8: Persepsi Tentang *Tangible*



Berdasarkan Diagram 8 dapat dilihat bahwa mayoritas pengguna layanan menyatakan kualitas tangibles berada pada kategori baik (94%) dan hanya 4 % menyatakan aspek tampilan fisik tersebut berada pada kategori buruk.

b. Persepsi tentang *Realibility*

Reliability diartikan sebagai kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. Diagram 9 menggambarkan persepsi mengenai realibility layanan di Pemkot Depok. Mayoritas pengguna layanan yakni sebanyak 94% menyatakan kemampuan dan kehandalan Pemkot Depok dalam menyediakan layanan berada pada kategori baik atau dapat dipercaya, dan hanya 4% yang menyatakan Pemkot Depok buruk kemampuan dan keandalannya dalam penyediaan layanan.

Diagram 9: Persepsi tentang *Realibility*



c. Persepsi tentang Responsivness

Responsiveness atau daya tanggap diartikan sebagai kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. Diagram 10 menggambarkan bagaimana persepsi pengguna layanan pendidikan tentang daya tanggap Pemkot Depok dalam melayani secara cepat dan tepat. Sebanyak 64% pengguna layanan menyatakan daya tanggap Pemkot Depok masih buruk dan 36% menyatakan daya tanggap Pemkot Depok dalam pelayanan pendidikan sudah baik.

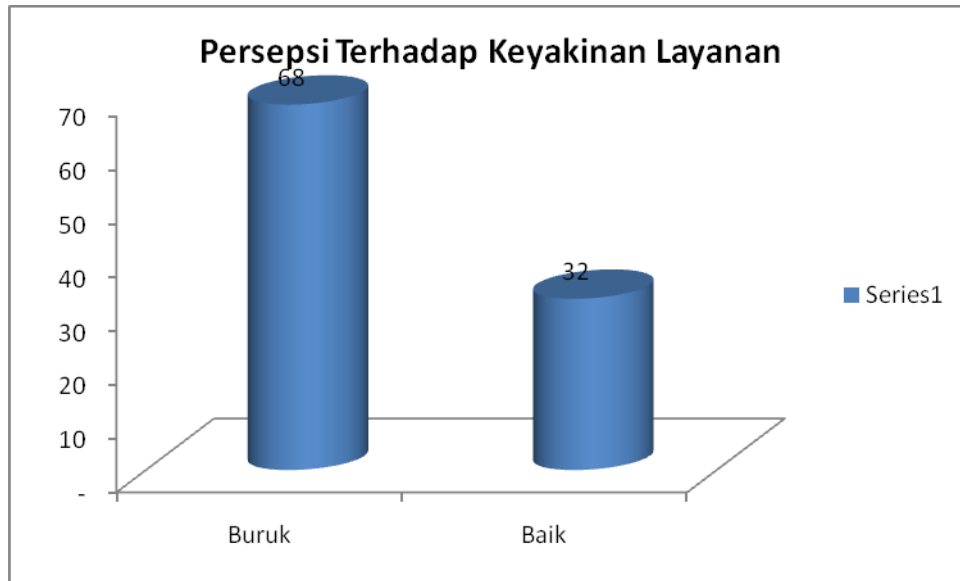
Diagram 10: Persepsi tentang *Responsivness*



d. Persepsi tentang *Assurance*

Assurance diartikan sebagai kemampuan dan keramahan, serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. Diagram 11 menggambarkan bagaimana persepsi pengguna layanan pendidikan mengenai *assurance* di Pemkot Depok. Sebanyak 68% pengguna layanan menyatakan bahwa jaminan mengenai janji lalanan yang diberikan berada pada kategori buruk dan hanya 32% menyatakan Pemkot Depok mampu menjamin layanan yang diberikannya (kategori baik).

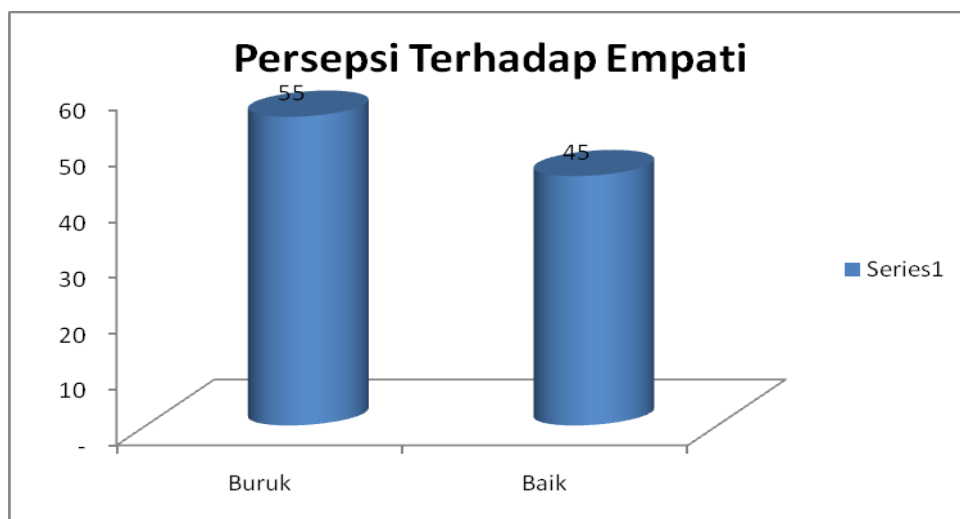
Diagram 11: Persepsi tentang Assurance



e. Persepsi Terhadap Empati

Emphaty diartikan sebagai sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen. Diagram 12 menginformasikan bagaimana empati penyedia layanan kepada pengguna layanan pendidikan di Pemkot Depok. Sebanyak 55% pengguna layanan menyatakan Pemkot Depok mempunyai empati yang buruk kepada pengguna layanan dan sebanyak 45% menyatakan Pemkot Depok mempunyai empati yang baik dalam melayani penggun layanan pendidikan.

Diagram 12: Persepsi tentang Empati



I. Kualitas Pelayanan

Seperti diuraikan di atas, Zeithaml, et al (1990), menyederhanakan dimensi pelayanan menjadi lima aspek yang dinyatakan dengan *SERVQUAL Dimensions*, yaitu: *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *emphaty*. Berdasarkan data yang dipaparkan di atas mengenai aspek pelayanan pendidikan di Pemkot Depok, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan pendidikan yang dilaksanakan di Pemkot Depok dinyatakan berada dalam kategori baik (89%) dan hanya 11% yang menyatakan kualitas layanan pendidikan di Pemkot Depok berada pada kategori buruk, seperti disajikan pada Diagram 13.

Diagram 13: Kualitas Pelayanan Pendidikan



J. Pengaruh Implementasi Kebijakan Anggaran Pendidikan dan Kualitas Layanan Pendidikan di Kota Depok

Seperti dijelaskan di atas, Edwards III (1980) menawarkan dan mempertimbangkan beberapa faktor yang mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan publik, diantaranya adalah komunikasi, dukungan sumber daya, dan sikap pelaksana kebijakan. Implementasi kebijaksanaan publik

diselenggarakan oleh birokrasi pemerintahan. Pada sisi yang lain, sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi pemerintahan juga menyelenggarakan pelayanan publik. Untuk dapat mengukur kualitas pelayanan publik Zeithaml, et al (1990), menyatakan lima dimensi pelayanan yang dikenal sebagai *SERVQUAL Dimensions*, yaitu: *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *responsiveness*, dan *emphaty*. Secara logika, jika implementasi kebijakan berjalan dengan baik maka dengan sendirinya pelayanan publik pun akan menunjukkan peningkatan.

Untuk melihat apakah ada keterkaitan antara faktor-faktor yang mempunyai peranan dalam implementasi kebijakan anggaran pendidikan (komunikasi organisasi, dukungan sumberdaya, dan sikap pelaksana) mempunyai pengaruh yang signifikan dengan kualitas pelayanan pendidikan, berikut dilakukan uji statistik Sommers'D.

Berikut adalah analisa tentang pengaruh komunikasi organisasi, dukungan sumberdaya, dan sikap pelaksana sebagai faktor yang menentukan kinerja implementasi kebijakan terhadap kualitas pelayanan pendidikan di Pemkot Depok.

a. Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Tabel 3 menggambarkan hubungan antara faktor komunikasi organisasi (X1) dengan kualitas layanan pendidikan (Y) di Pemkot Depok, yang dapat dideskripsikan komunikasi organisasi yang buruk (50%) maka kualitas layanan juga buruk (8,9%). Sedangkan komunikasi yang baik maka kualitas pelayanan juga cenderung baik (91%). Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara faktor komunikasi organisasi dengan kualitas layanan.

Tabel 3: Hubungan antara Komunikasi Organisasi dan Kualitas Pelayanan

			pelayananakhir		Total
			1	2	
komunikasiakhir	1	Count	1	1	2
		% within komunikasiakhir	50.0%	50.0%	100.0%
	2	Count	4	41	45
		% within komunikasiakhir	8.9%	91.1%	100.0%
Total		Count	5	42	47
		% within komunikasiakhir	10.6%	89.4%	100.0%

Seperti diuraikan di atas bahwasannya terdapat hubungan yang positif antara faktor komunikasi organisasi dengan kualitas pelayanan pendidikan di Pemkot Depok. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi organisasi terhadap kualitas pelayanan pendidikan dilakukan Uji Statistik Somers'D seperti dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4: Uji Somers'D Komunikasi dengan Kualitas Pelayanan

			Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Somers' d	Symmetric	.247	.219	.918	.359
		komunikasiakhir Dependent	.176	.180	.918	.359
		pelayananakhir Dependent	.411	.356	.918	.359

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa koefisien kekuatan hubungan Value menunjukkan 0,411 masih jauh dari koefisien 1, di mana semakin mendekati angka 1 maka kekuatan semakin besar. Hal ini berarti komunikasi organisasi hanya menunjukkan pengaruh yang kecil terhadap kualitas pelayanan pendidikan di Pemkot Depok.

b. Hubungan antara Dukungan Sumberdaya dan Kualitas Pelayanan

Diagram 16 menunjukkan hubungan antara dukungan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah dan kualitas pelayanan pendidikan di Pemkot Depok. Berdasarkan tabel silang tersebut dapat dideskripsikan bahwa antara dukungan sumberdaya tidak ada hubungannya dengan kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik (100%) justru sumberdayanya buruk (0%). Demikian pula sebaliknya, kualitas pelayanan buruk (11,4%) justru dukungan sumberdayanya baik (88,6%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara dukungan sumberdaya dengan kualitas pelayanan pendidikan di Pemkot Depok.

Tabel 5 : Hubungan Sumberdaya dengan Kualitas Pelayanan

			pelayananakhir		Total
			1	2	
sumberdayaakhir	1	Count	0	3	3
		% within sumberdayaakhir	.0%	100.0%	100.0%
	2	Count	5	39	44
		% within sumberdayaakhir	11.4%	88.6%	100.0%
Total		Count	5	42	47
		% within sumberdayaakhir	10.6%	89.4%	100.0%

Hubungan negatif antara sumberdaya dengan kualitas pelayanan diperkuat pula oleh uji Somers'D, seperti dapat dilihat pada Tabel 6. Koefisien Somers'D negatif (-1,44).

Tabel 6: Uji Somers'D DukunganSumberdaya dan Kualitas Pelayanan

			Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Somers' d	Symmetric	-.088	.032	-1.494	.135
		sumberdayaakhir Dependent	-.071	.040	-1.494	.135
		pelayananakhir Dependent	-.114	.048	-1.494	.135

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Hubungan antara Sikap Pelaksana dan Pelayanan

Hubungan antara sikap pelaksana dengan kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 7, yang menunjukkan hubungan positif yang ditandai dengan kecenderungan jika sikap pelaksana buruk (33%) maka kualitas pelayanan juga buruk (9,1%). Dan jika sikap pelaksana baik (66%) maka kualitas pelayanan juga cenderung baik (90,9%).

Tabel 7: Hubungan Sikap Pelaksana dengan Kualitas Pelayanan

			pelayananakhir		Total
			1	2	
sikapakhir	1	Count	1	2	3
		% within sikapakhir	33.3%	66.7%	100.0%
	2	Count	4	40	44
		% within sikapakhir	9.1%	90.9%	100.0%
Total		Count	5	42	47
		% within sikapakhir	10.6%	89.4%	100.0%

Untuk melihat kekuatan hubungan antara sikap pelaksana dengan kualitas pelayanan pendidikan dilakukan Uji Somers'D, seperti dapat dilihat pada Tabel 8, yang menunjukkan pengaruh yang lemah. Value hanya menunjukkan 0,242 yang berarti masih jauh dari 1.

Tabel 8: Uji Somers'D Sikap Pelaksana dengan Kualitas Pelayanan

			Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Somers' d	Symmetric	.187	.211	.800	.424
		sikapakhir Dependent	.152	.182	.800	.424
		pelayananakhir				
		Dependent	.242	.276	.800	.424

a. Not assuming the null hypothesis.

d. Hubungan implementasi kebijakan anggaran pendidikan dengan kualitas pelayanan pendidikan

Hubungan antara implementasi kebijakan anggaran pendidikan dengan kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat pada Diagram 20. Berdasarkan informasi yang ditunjukkan oleh Diagram 20 dapat dikatakan bahwa hubungan antara implementasi kebijakan dengan pelayanan bersifat negatif. Kecenderungan tersebut dapat dilihat dari implementasi kebijakan yang buruk (10,6%) justru diikuti oleh kualitas pelayanan yang baik (89,4%). Demikian pula sebaliknya

kualitas pelayanan yang buruk (10,6%) yang terjadi adalah adanya dukungan sumber daya yang baik (8,4%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara implementasi kebijakan dengan kualitas pelayanan.

Tabel 9: Hubungan Implementasi dengan Kualitas Pelayanan

			pelayananakhir		Total
			buruk	baik	
implementasikebijakan	Baik	Count	5	42	47
		% within implementasikebijakan	10.6%	89.4%	100.0%
		% within pelayananakhir	100.0%	100.0%	100.0%
Total		Count	5	42	47
		% within implementasikebijakan	10.6%	89.4%	100.0%
		% within pelayananakhir	100.0%	100.0%	100.0%

BAB V KESIMPULAN

Mayoritas pelaksana kebijakan adalah perempuan, mempunyai masa kerja lebih dari 16 tahun, berpendidikan S2 dan mempunyai golongan pangkat 4. Keterkaitan antara implementasi kebijakan anggaran terhadap kualitas pelayanan dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Mayoritas pelaksana menyatakan bahwa komunikasi di dalam organisasi penyedia layanan pendidikan menyatakan berlangsung dengan baik (96%) dan hanya 4 % yang menyatakan komunikasi berlangsung buruk. Dengan demikian faktor transmisi, konsistensi, dan kejelasan komunikasi berjalan dengan baik.
- b. Mayoritas pelaksana kebijakan menyatakan bahwa pemerintah menyediakan sumberdaya dengan baik (94%), dan hanya 6% yang menyatakan sumberdaya yang ada buruk. Kondisi ini memperkuat keadaan staf, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas tersedia dengan baik.
- c. Mayoritas pelaksana kebijakan menyatakan sikap pelaksana berada pada kategori baik (94%) dan hanya 6% yang menyatakan sikap pelaksana berada pada kategori buruk. Dengan demikian faktor perilaku dan insentif dikategorikan baik.

Berdasarkan informasi tersebut di atas, maka secara umum persepsi pegawai terhadap implementasi kebijakan anggaran pendidikan digambarkan tidak mengalami hambatan yang berarti dan dipandang berjalan dengan baik. Sedangkan kualitas pelayanan pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Mayoritas pegawai menyatakan kualitas *tangibles* berada pada kategori baik (94%) dan hanya 4 % menyatakan aspek tampilan fisik tersebut berada pada kategori buruk
- b. Mayoritas pegawai yakni sebanyak 94% menyatakan kemampuan dan kehandalan Pemkot Depok dalam menyediakan layanan berada pada kategori baik atau dapat dipercaya, dan hanya 4% yang menyatakan

Pemkot Depok buruk kemampuan dan keandalannya dalam penyediaan layanan.

- c. Sebanyak 64% pegawai menyatakan daya tanggap Pemkot Depok masih buruk dan 36% menyatakan daya tanggap Pemkot Depok dalam pelayanan pendidikan sudah baik.
- d. Sebanyak 55% pegawai menyatakan Pemkot Depok mempunyai empati yang buruk kepada pengguna layanan dan sebanyak 45% menyatakan Pemkot Depok mempunyai empati yang baik dalam melayani pengguna layanan pendidikan.

Berdasarkan informasi tersebut di atas, maka secara umum dapat dinyatakan maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan pendidikan yang dilaksanakan di Pemkot Depok dinyatakan berada dalam kategori baik (89%) dan hanya 11% yang menyatakan kualitas layanan pendidikan di Pemkot Depok berada pada kategori buruk. Berkaitan dengan seberapa besar pengaruh antara implementasi dengan kualitas pelayanan dapat disimpulkan bahwa:

- a. Terdapat hubungan yang positif antara faktor komunikasi organisasi dengan kualitas layanan. Namun demikian pengaruh kekuatan faktor komunikasi organisasi terhadap kualitas pelayanan pendidikan cenderung lemah, yang ditunjukkan oleh koefisien Somers'D yang hanya 0,411.
- b. Terdapat hubungan yang negatif antara dukungan sumberdaya dengan kualitas pelayanan pendidikan di Pemkot Depok. Hubungan negatif antara sumberdaya dengan kualitas pelayanan diperkuat pula oleh uji Somers'D, seperti dapat dilihat pada Diagram 17. Koefisien Somers'D negatif (-1,44).
- c. Hubungan antara sikap pelaksana dengan kualitas pelayanan pendidikan menunjukkan hubungan positif. Kekuatan hubungan antara sikap pelaksana dengan kualitas pelayanan pendidikan menunjukkan pengaruh yang lemah. Value hanya menunjukkan 0,242 yang berarti masih jauh dari angka 1.
- d. Secara umum dapat dikatakan bahwa bahwa hubungan antara mplementasi kebijakan dengan kualitas pelayanan bersifat negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James. E. (1979). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed.
- Djopari., JRG. (1997). *Kebijaksanaan Pemerintah*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Dye, Thomas R. (1978). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, N.J. 7632: Prentice Hall, Inc., 3rd ed.
- Easton, David. (1953). *The Political System*. New York: Knopf.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.
- Friedrick, Carl J. (1963). *Man and His Government*. New York: Mc Graw Hill.
- Jenkins, W.I. (1978). *Policy Analysis*. Oxford: Martin Robertson.
- Jones, Charles O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Kotler, Philip. (1994). *Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation and Control*, Prentice Hall International. Eight Edition.
- Lasswell, Harold D. Abraham Kaplan. 1970. *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- _____. (1997). *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Alih Bahasa Ancella Anitawati Hermawan. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Nugroho D, Riant. (2003). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- _____. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta : Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Pressman, J.L and Wildavsky. (1979). *A Implementation*. Berkely: University of California Press.
- Rohman, Arif. (2002). *Akar Ideologis Problem Kebijakan Pendidikan*. Jurnal. Fondasia, Volume II, No-2/ Th. I, September 2002.
- Sianipar, J. P. G (1999). *Manajemen Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: LAN-RI.

- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pererbit Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi, (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Udoji, Chief J.O. (1981). *The African Public Servant as a Public Maker, Public Policy in Africa*. Addis Abeba: Association for Public Administration and Management.
- Umar, Husein. (2005). *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zeithaml, Valarie A.A. Parasuraman & Leonard L. Berry. (1990). *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectation*. New York: The Free Press, Macmillan Inc.

Dokumen dan Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang *Pengelolaan Pendidikan Kota Depok*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

KUESIONER

Penelitian Implementasi Kebijakan Anggaran Pendidikan Terhadap Kualitas Pelayanan Di Kota Depok

PENGANTAR

Untuk mengetahui implementasi kebijakan anggaran di bidang pendidikan dan kaitannya dengan kualitas pelayanan pendidikan di Pemerintah Kota Depok, kami membutuhkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai PNS di Pemkot Depok. Untuk itu, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi Kuesioner ini dengan cara membubuhkan tanda ☒ pada kotak pilihan jawaban yang paling sesuai. Pada pertanyaan terbuka, mohon tuliskan jawaban Anda pada tempat yang disediakan.

A. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Jenis kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
- b. Masa Kerja : ☐ 1 – 3 th
☐ 4 – 10th
☐ 11 – 15th
☐ > 16 th
- c. Pendidikan :
☐ SLTA
☐ DIPLOMA
☐ S1
☐ S2/S3
- d. Berapa lama anda telah menggunakan komputer?
☐ 1 – 5 tahun
☐ 6 – 10 tahun
☐ ≥ 11 tahun
- e. Jabatan:
- f. Pangkat/Golongan :
- g. Instansi :

B. KUESIONER

Petunjuk Pengisian Angket :

Bapak/Ibu/Sdr. dapat memilih satu item jawaban dari pertanyaan yang menurut Bapak/Ibu/Sdr paling sesuai dengan pengalaman dan kenyataan di lapangan, dengan mem[] tanda silang pada alternatif jawaban yang tersedia.

4 : SANGAT BAIK

3 : BAIK

2: KURANG BAIK

1: SANGAT TIDAK BAIK

NO	PERNYATAAN	PERSEPSI			
		4	3	2	1
KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI					
1	Pembuat kebijakan anggaran pendidikan menyosialisasikan program/kegiatan kepada pelaksana kebijakan dengan cepat.				
2	Pembuat kebijakan anggaran pendidikan mensosialisasikan program/kegiatan kepada pelaksana kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku				
3	Informasi pembuat kebijakan anggaran pendidikan kepada para pelaksana anggaran tidak membingungkan				
4	Kualitas media sosialisasi kebijakan anggaran pendidikan menentukan pelaksanaan kebijakan anggaran pendidikan di lapangan				
5	Selama ini, kooordinasi antar unit pelaksana kebijakan anggaran pendidikan di lapangan terlaksana secara intensif				
6	Selama ini, cara mengkoordinasikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tahapan kegiatan anggaran pendidikan				
SUMBER DAYA		4	3	2	1
7	Selama pelaksanaan kegiatan anggaran pendidikan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai				
8	Menurut saya, ketersediaan sarana & prasarana berdampak baik terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran pendidikan				
9	Menurut saya, pelaksanaan kegiatan anggaran pendidikan didukung oleh dana yang memadai				
10	Menurut saya, ketersediaan dana berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan anggaran pendidikan				
11	Menurut saya, jumlah SDM pelaksana anggaran pendidikan sangat mencukupi ketercapaian tugas dan kegiatan				
12	Para pelaksana anggaran pendidikan memiliki pendidikan yang relevan dengan kegiatan anggaran pendidikan				

13	Unit Pelaksana Teknis Pelaksana dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan memiliki tujuan dan fungsi yang jelas				
14	Para pelaksana dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan pembagian tugas dalam tahapan anggaran pendidikan				
15	para pelaksana anggaran pendidikan memiliki daya dukung tim kerja yang kuat dalam menjalankan kegiatan anggaran pendidikan				
SIKAP PELAKSANA		4	3	2	1
16	Menurut saya, para pelaksana anggaran memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan anggaran pendidikan				
17	Menurut saya, para pelaksana anggaran pendidikan memiliki keahlian yang memadai di bidang pendidikan				
18	Para pelaksana anggaran pendidikan patuh melaksanakan tugas-tugas dalam kegiatan anggaran pendidikan				
19	Para pelaksana anggaran pendidikan memiliki keyakinan yang tinggi dalam menyukseskan tugas-tugas dalam kegiatan anggaran pendidikan				
20	Para pelaksana anggaran pendidikan selalu merespon terhadap tugas-tugas dalam kegiatan anggaran pendidikan				
21	Para pelaksana anggaran pendidikan diberi penghargaan lisan oleh pembuat kebijakan atas kinerjanya melaksanakan tugas-tugas dalam kegiatan anggaran pendidikan				
22	Para pelaksana diberi penghargaan tertulis oleh pembuat kebijakan anggaran pendidikan atas kinerjanya melaksanakan tugas-tugas dalam kegiatan anggaran pendidikan				
23	Pembuat kebijakan selalu memberi dukungan moril kepada para pelaksana anggaran dalam melaksanakan tugas-tugas mencapai kegiatan anggaran pendidikan				
24	Para pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan semua tahapan kegiatan anggaran pendidikan				
KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR		4	3	2	1
BERWUJUD					
25	Sarana prasarana tersedia sangat lengkap di Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Sekolah (SD,SMP,SMA)				
26	Sarana di kantor/UPT/Sekolah sangat nyaman				
27	Lokasi UPT/Sekolah sangat menjangkau masyarakat .pengguna layanan pendidikan				

28	Persyaratan memperoleh pelayanan pendidikan di kantor/UPT/Sekolah sangat mudah				
29	Biaya pendidikan dasar di kantor/UPT/Sekolah Dasar sangat terjangkau				
30	Pelaksana pendidikan dasar yang melayani bapak/ibu di kantor/UPT/Sekolah pendidikan dasar sangat disiplin				
31	Masyarakat sangat terlayani dalam bidang pendidikan				
32	Menurut saya lingkungan kantor/UPT/Sekolah sangat bersih				
KEHANDALAN		4	3	2	1
33	Selama ini petugas UPT/Sekolah sangat tepat waktu dalam pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan				
34	Selama ini pelaksana kebijakan pendidikan melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional pelayanan (SOP) dalam pelaksanaan tugas di UPT/Sekolah				
35	Selama ini, pelaksana kebijakan pendidikan memberikan perlakuan yang sama terhadap pengguna layanan pendidikan.				
36	Selama ini, pelaksana kebijakan pendidikan di UPT/Sekolah menggunakan atribut wajar dalam melaksanakan layanan untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.				
KETANGGAPAN		4	3	2	1
37	Selama ini pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan di kantor/UPT/Sekolah dilakukan oleh pegawai yang memiliki ketanggapan dalam melayani kebutuhan pengguna pendidikan.				
38	Selama ini pelaksana tugas pelayanan di kantor/UPT/Sekolah merespon kritik dan saran dari pengguna pendidikan.				
39	Selama ini pelaksana tugas pelayanan di kantor/UPT/Sekolah dilakukan oleh pegawai penuh perhatian dan tanggap dalam menyelesaikan keluhan pengguna pendidikan.				
40	Selama ini pelaksana tugas pelayanan di kantor/UPT/Sekolah mempermudah pengguna pendidikan untuk berkomunikasi dan berinteraksi timbal balik.				
41	Pelaksana tugas pelayanan di kantor/UPT/Sekolah memiliki pengetahuan yang memadai tentang kebijakan anggaran pendidikan dan kondisi lapangan.				
KEYAKINAN		4	3	2	1
42	Selama ini pelaksanaan tugas pelayanan di kantor/UPT/Sekolah dilakukan oleh pegawai yang memiliki kemampuan memberikan jaminan keamanan kepada pengguna.				

43	Selama ini pelaksanaan tugas pelayanan di kantor/UPT/Sekolah dilakukan oleh pegawai yang memiliki kemampuan menjelaskan informasi payung hukum pendidikan ketika melayani pengguna.				
44	Selama ini pelaksanaan tugas pelayanan di kantor/UPT/Sekolah dilakukan oleh pegawai yang memiliki kemampuan memberikan kepastian tentang biaya pelayanan pendidikan kepada pengguna.				
45	Selama ini pelaksanaan tugas pelayanan di kantor/UPT/Sekolah dilakukan oleh pegawai yang memiliki tanggung jawab dan kemampuan menyelesaikan pelayanan secara prima.				
46	Selama ini pelaksana tugas pelayanan di kantor/UPT/Sekolah memberikan petunjuk yang benar dan <i>one stop service</i> kepada pengguna layanan pendidikan.				
EMPATI		4	3	2	1
47	Selama ini pelaksanaan tugas pelayanan di kantor/UPT/Sekolah dilakukan oleh pegawai yang memiliki kemampuan untuk mendahulukan kepentingan dan kebutuhan pengguna pendidikan.				
48	Selama ini pelaksanaan tugas pelayanan di kantor/UPT/Sekolah dilakukan oleh pegawai yang memiliki kemampuan empati dan memberi penjelasan dengan suka cita.				
49	Selama ini pelaksanaan tugas pelayanan di kantor/UPT/Sekolah dilakukan oleh pegawai yang memiliki kemampuan untuk mengetahui kebutuhan pengguna.				
50	Selama ini pelaksanaan tugas pelayanan di kantor/UPT/Sekolah dilakukan oleh pegawai yang memiliki sifat ramah kepada pengguna.				
51	Selama ini pelaksanaan tugas pelayanan di kantor/UPT/Sekolah dilakukan oleh pegawai yang memiliki kekininan untuk selalu menyelesaikan masalah sesegera mungkin demi kepentingan pengguna pendidikan dan unit.				

LAMPIRAN 2 . DATA ORDINAL VARIABLE IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN (X)

Responden	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN (X)																										
	Komunikasi Antar Organisasi						X1	Sumber Daya								X2	Sikap Pelaksana										X3
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	3	4	4	3	3	3	20	3	4	4	4	3	4	4	3	4	33	4	4	3	4	3	3	3	4	3	31
2	3	3	3	2	3	3	17	3	4	3	4	2	3	3	3	3	28	3	3	3	3	3	2	2	3	3	25
3	3	3	3	2	3	3	17	3	4	3	4	2	3	3	3	3	28	3	3	3	3	3	2	2	2	2	23
4	3	4	3	2	3	4	19	2	3	3	3	2	2	3	3	2	23	4	3	3	3	4	2	3	3	4	29
5	3	4	3	0	3	3	16	4	3	3	3	3	4	4	3	4	31	3	4	3	3	3	2	3	3	3	27
6	3	3	3	3	2	2	16	3	3	3	3	2	3	3	3	2	25	3	3	3	3	3	3	2	3	3	26
7	4	4	4	4	4	4	24	3	4	3	3	3	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
8	4	3	3	4	3	3	20	3	4	3	4	2	3	4	3	3	29	3	3	4	3	4	3	4	4	4	32
9	2	3	3	4	2	2	16	3	3	3	4	2	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	1	1	2	3	22
10	3	3	3	3	3	3	18	2	3	3	3	2	2	3	3	3	24	3	2	3	3	3	3	3	3	3	26
11	3	4	4	3	4	4	22	3	4	3	3	3	4	3	3	3	29	3	3	3	3	3	3	2	3	3	26
12	4	3	3	3	3	3	19	4	4	3	3	3	3	3	3	3	29	4	4	3	3	3	3	3	3	3	29
13	4	3	3	4	3	4	21	3	4	3	4	3	3	3	3	3	29	4	3	4	4	4	3	2	3	3	30
14	4	4	4	3	3	3	21	3	4	3	3	2	3	4	3	3	28	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28
15	4	4	4	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	2	2	3	3	3	3	4	4	3	27
16	3	3	3	3	3	2	17	3	4	3	4	0	3	2	3	3	25	3	2	3	3	2	2	3	3	0	21
17	4	4	4	3	4	4	23	3	4	4	4	3	3	4	4	4	33	3	3	4	4	4	4	3	3	3	31
18	4	4	4	4	4	4	24	3	4	3	4	3	4	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
19	3	3	3	3	3	3	18	3	4	3	3	2	3	3	3	3	27	3	2	3	3	3	2	2	3	3	24
20	4	3	3	3	4	3	20	3	3	3	2	2	2	2	2	2	21	2	2	3	3	4	3	3	3	3	26
21	4	4	4	4	3	3	22	3	4	3	4	3	4	4	4	4	33	3	3	4	4	4	3	3	4	4	32
22	4	3	3	3	3	3	19	4	3	4	4	3	3	3	3	3	30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
23	4	4	4	3	3	3	21	3	4	4	4	3	3	3	3	3	30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
24	3	3	3	4	4	3	20	3	4	3	4	3	3	3	3	3	29	3	3	3	3	3	4	3	4	3	29
25	4	4	4	4	4	4	24	3	3	3	4	3	4	3	3	3	29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27

26	3	3	3	3	3	3	18	3	4	3	4	2	3	2	3	3	27	3	3	3	3	3	2	2	3	3	25
27	3	4	3	3	3	0	16	3	3	3	4	3	4	3	3	3	29	4	4	3	3	3	4	3	3	30	
28	2	2	3	3	2	2	14	2	3	3	3	2	3	3	3	3	25	2	2	3	3	2	3	2	3	23	
29	3	4	4	3	2	3	19	3	4	2	3	2	2	3	3	3	25	3	3	3	3	2	3	3	4	27	
30	4	4	4	3	3	3	21	3	3	4	4	3	4	3	3	3	30	3	3	3	3	3	2	3	3	26	
31	3	4	2	4	3	3	19	2	4	4	3	3	3	4	3	2	28	4	4	4	3	3	2	3	4	31	
32	3	3	3	3	2	3	17	2	3	3	2	3	3	3	2	3	24	3	2	3	3	3	4	4	3	28	
33	3	4	2	3	3	3	18	4	4	2	4	2	4	4	3	4	31	4	3	4	4	3	4	4	3	33	
34	3	3	3	4	3	3	19	4	4	3	3	4	3	3	3	4	31	3	4	0	3	4	3	3	3	27	
35	3	3	3	3	3	3	18	4	4	3	3	3	4	3	3	4	31	3	3	3	3	4	4	3	3	30	
36	3	3	3	3	2	2	16	2	2	2	3	2	0	0	2	3	16	3	3	3	3	4	4	3	3	30	
37	3	3	3	3	2	2	16	2	2	2	3	2	0	0	2	3	16	3	3	3	3	4	4	3	3	30	
38	3	3	4	3	3	3	19	4	3	3	3	4	4	3	4	3	31	4	3	3	3	3	3	4	3	29	
39	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	3	27	
40	3	3	3	3	3	3	18	2	3	3	4	2	3	3	3	3	26	3	3	3	3	3	3	3	3	27	
41	2	3	3	3	3	3	17	3	3	4	4	3	2	2	2	0	23	2	2	3	3	3	2	2	3	23	
42	3	3	3	3	1	1	14	2	3	3	3	3	2	3	2	3	24	2	2	2	2	2	3	2	3	21	
43	3	2	3	3	2	3	16	3	4	2	4	3	2	3	3	3	27	3	2	3	3	3	3	2	3	25	
44	3	2	3	3	2	3	16	3	4	4	4	2	2	3	3	3	28	2	2	2	3	3	3	4	4	27	
45	2	3	4	2	2	2	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	2	2	2	2	2	2	2	2	19	
46	3	4	3	3	2	2	17	3	4	2	4	3	3	2	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	3	27	
46	2	4	3	4	3	3	19	3	4	4	4	4	3	4	4	3	33	3	4	4	4	4	3	3	4	32	

LAMPIRAN 3. DATA ORDINAL VARIABLE KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR (Y)

Responden	KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR (y)																															
	BERWUJUD Organisasi								Y1	KEHANDALAN				Y2	KETANGGAPAN (Y3)					Y3	KEYAKINAN (Y4)					Y4	EMPATI (Y5)					Y5
	25	26	27	28	29	30	31	32		33	34	35	36		37	38	39	40	41		42	43	44	45	46		47	48	49	50	51	
1	2	2	3	3	3	3	3	2	21	2	3	3	3	11	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
2	2	2	3	3	3	3	3	3	22	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
3	2	2	3	3	3	3	3	3	22	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
4	2	0	3	3	4	2	3	3	20	4	3	3	4	14	3	3	3	4	3	16	3	3	3	3	3	15	4	4	3	4	3	18
5	3	0	3	3	3	4	3	3	22	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
6	2	2	2	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	12	3	3	3	4	4	17	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	4	20
7	3	3	4	4	4	3	4	3	28	3	4	4	3	14	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
8	2	3	3	3	4	4	3	4	26	3	3	3	3	12	3	3	4	4	3	17	3	3	2	3	3	14	3	4	3	4	4	18
9	2	3	3	3	4	2	3	2	22	2	3	3	3	11	2	3	2	3	2	12	2	2	3	2	2	11	3	3	2	3	2	13
10	3	2	3	3	4	3	3	0	21	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
11	2	2	2	3	3	3	3	3	21	2	2	3	3	10	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
12	2	2	3	3	3	3	3	3	22	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
13	3	3	3	3	3	3	4	3	25	3	3	3	3	12	4	3	3	3	3	16	3	3	3	4	3	16	4	3	3	3	3	16
14	3	4	3	3	4	3	3	3	26	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
15	2	2	3	3	3	2	3	2	20	3	3	3	3	12	3	3	3	3	2	14	2	2	2	2	2	10	3	2	2	2	2	11
16	2	2	2	2	3	2	2	2	17	2	2	2	2	8	2	2	2	3	2	11	2	2	2	2	2	10	4	3	3	3	3	16
17	3	3	4	4	4	3	4	4	29	3	4	4	3	14	4	4	4	4	4	20	3	3	3	4	4	17	3	3	4	4	4	18
18	3	3	4	4	4	3	4	3	28	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
19	2	3	3	3	3	3	3	3	23	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
20	2	2	3	3	3	3	3	3	22	3	3	3	3	12	2	3	3	4	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	2	3	3	14
21	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	0	3	2	3	3	11
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	16	3	3	3	4	4	17	4	4	3	3	4	18	4	3	4	4	4	19
23	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
24	2	2	4	4	4	3	4	3	26	3	3	4	4	14	4	3	3	4	3	17	4	4	4	3	4	19	4	4	4	4	4	20
25	2	3	3	3	3	3	3	3	23	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20

26	2	2	3	3	4	3	3	2	22	3	3	3	3	12	3	3	3	3	2	14	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24	0	0	0	0	0	4	3	3	3	4	17	3	4	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20
28	2	2	3	3	3	2	3	3	21	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
29	2	2	3	3	4	3	3	2	22	3	3	4	4	14	3	3	3	3	3	15	3	4	3	3	3	16	3	3	4	3	3	16
30	3	2	3	3	3	3	3	2	22	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
31	3	0	3	4	4	3	4	0	21	3	3	3	3	12	3	4	3	3	3	16	2	4	3	3	4	16	3	3	4	4	4	18
32	3	3	3	4	3	3	3	4	26	3	3	3	3	12	3	3	3	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2	2	2	4	4	3	4	3	24	4	3	3	3	13	3	4	3	3	3	16	3	3	3	3	3	15	4	3	3	4	3	17
34	4	0	4	4	0	3	3	3	21	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	4	3	3	3	16
35	2	3	3	3	3	3	3	3	23	4	4	4	3	15	4	3	4	3	4	18	3	4	3	3	4	17	3	4	3	4	3	17
36	2	3	3	3	3	3	3	3	23	4	4	4	3	15	4	3	4	3	4	18	3	4	3	3	4	17	3	4	3	4	3	17
37	2	3	3	3	3	3	3	3	23	4	4	4	3	15	4	3	4	3	4	18	3	4	3	3	4	17	3	4	3	4	3	17
38	3	3	3	3	3	4	0	0	19	4	3	4	0	11	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
39	3	3	3	2	2	2	3	3	21	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
40	2	2	2	3	4	3	3	3	22	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	1	3	3	13	3	3	3	3	4	16
41	2	2	3	0	3	3	3	2	18	2	3	3	3	11	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
42	2	2	2	3	3	2	3	0	17	3	3	3	3	12	3	3	3	3	2	14	2	2	3	2	2	11	2	3	2	2	2	11
43	2	2	3	3	3	3	3	3	22	3	3	3	3	12	3	3	3	3	0	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
44	2	2	3	3	4	3	3	3	23	3	3	3	3	12	3	4	4	4	4	19	3	3	2	3	3	14	3	3	3	3	3	15
45	2	3	3	3	4	3	3	2	23	2	2	2	2	8	2	2	3	3	3	13	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
46	2	2	3	3	3	3	3	2	21	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	2	4	15	3	3	3	3	3	15
47	3	2	3	3	3	3	3	3	23	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20

Lampiran

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

Anggaran Biaya

No	JENIS PENGELUARAN	BIAYA YANG DIUSULKAN
1	GAJI DAN UPAH (MAX 30 %)	3.528.000
2	BAHAN HABIS PAKAI DAN PERALATAN (30–40%)	7.980.000
3	PERJALANAN (15–25%)	1.955.500
4	LAIN-LAIN: PUBLIKASI, SEMINAR, LAPORAN, LAINNYA (MAKS. 15%)	1.536.500
	JUMLAH	15.000.000

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Persiapan								
	a. Studi Pustaka								
	b. Pra Penelitian								
	c. Penulisan Proposal Penelitian								
2	Pengumpulan Data								
	a. Dokumen								
	b. Observasi								
	c. Wawancara								
	d. Angket								
3	Pengolahan Data								
4	Penulisan Laporan								
5	Seminar Penelitian								

LAMPIRAN . JUSTIFIKASI ANGGARAN

1. HONOR				
HONOR	HONOR/JAM (Rp)	WAKTU (JAM/MINGGU)	MINGGU	HONOR PER TAHUN (Rp)
Ketua	9500	4 Jam/Minggu	36	1.368.000
Anggota 1	7500	4 Jam/Minggu	36	1.080.000
Anggota 2	7500	4 Jam/Minggu	36	1.080.000
SUB TOTAL (Rp)				3.528.000
2. PERALATAN PENUNJANG				
MATERIAL	JUSTIFIKASI PEMAKAIAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA PERALATAN PENUNJANG (Rp)
Modem	Penelusuran Pustaka	1	400.000	400.000
Pulsa modem	Penelusuran Pustaka	5	100.000	500.000
Pulsa Flash Disk/USB	Pulsa Penyimpanan Data		300.000	300.000
SUB TOTAL (Rp)				1.200.000
3. BAHAN HABIS PAKAI				
MATERIAL	JUSTIFIKASI PEMAKAIAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA PERALATAN PENUNJANG (Rp)
Souvenir		250 Responden	25.000	6.250.000
Kertas		10 Rim	35.000	350.000
Alat tulis		6	30.000	180.000
				6.780.000
SUB TOTAL (Rp)				
4. PERJALANAN				
MATERIAL	JUSTIFIKASI PERJALANAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA PERALATAN PENUNJANG (Rp)
Transport			1.956.500	1.955.500
SUB TOTAL (Rp)				1.956.500
5. LAIN-LAIN				
KEGIATAN	JUSTIFIKASI	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA PERALATAN PENUNJANG (Rp)
Penggandaan Kuesioner	Penggandaan Kuesioner uji validitas	30 Transport responden x 6 lembar	300	54.000

Penggandaan kuesioner	Penggandaan kuesioner final	255 x 6 lembar	150	382.500
Penggandaan laporan	Penggandaan laporan	10	50.000	500.000
Pendaftaran Seminar	Publikasi Hasil Penelitian	3	200.000	600.000
SUB TOTAL (Rp)				1.536.500
TOTAL ANGGARAN				15.000.000

LAMPIRAN . DUKUNGAN SARANA PRASARANA

1. Dari Institusi yaitu Universitas Terbuka (perpustakaan, internet, surat tugas).
2. Masyarakat dan Pemerintah Kota Depok (LSM, website pemerintah kota tersedia, data dan informasi tersedia).
3. Laboratorium: tidak ada.
4. Peralatan Utama (komputer, laptop) : ada.

**LAMPIRAN. SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITIAN DAN PEMBAGIAN
TUGAS**

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1.	Dra. Siti Aisyah, M.Si/0012066807	UT	Ilmu Pemerintahan/ Ilmu Politik	4 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> • Mendesain strategi penelitian yang akan dilaksanakan • Mengorganisasikan semua komponen yang menjadi perhatian dalam penelitian • Melakukan triangulasi
2.	Drs. Ayi Karyana, M.Si/0017086106	UT	Ilmu Administrasi Negara	4 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> • Bersama-sama dengan tim melakukan proses dan evaluasi pada setiap tahapan penelitian • Mempersiapkan pedoman wawancara • Melakukan triangulasi

LAMPIRAN. BIO DATA

4.1. Bio Data Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Siti Aisyah, Dra, M.Si
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	196806121999032001
5	NIDN	0012066807
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Solo, 12 Juni 1968
7	E-mail	aisyah@ut.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	081218270178
9	Alamat Kantor	Jalan Cabe Raya, Ciputat, Tangerang 15418
10	Nomor Telepon/Faks	(021) 7490941, Ex. 1915
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= orang
12. Mata Kuliah yang Diampu		Sistem Pemerintahan Indonesia
		Pembangunan Politik
		Sistem Pemerintahan Desa
		Perubahan sosial dan Pembangunan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Diponegoro, Semarang	Universitas Indonesia, Jakarta	-
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Ilmu Politik	-
Tahun Masuk-Lulus	1986/1991	2003/2005	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengaruh Agama, Pekerjaan dan Sifat Indepensi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) terhadap persepsi anggotanya mengenai KNPI	DPRD 1999-2004: Studi Kasus Peran DPRD Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat.	-
Nama Pembimbing/Promotor	Abdul Kahar Badjuri, Drs Purwoko, M,Si	Dr. Lili Romli, M.Si Dr. Tommy Legowo, M.Si.	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2006	Pengembangan Kits Tutorial Matakuliah Sistem Pemerintahan	Teaching Grants,	20.000.000

		Indonesia, Ketua	Dikti	
2	2009	Akuntabilitas Pada Lembaga Perwakilan Rakyat di Tingkat Lokal (Kasus Pertanggungjawaban Anggota DPRD Terhadap Masyarakat di Daerah Pemilihan Kota Depok), Ketua Peneliti.	UT	20.000.000
3	2009	Model Bahan Ajar Interaktif Berbasis Multimedia MK Sistem Pemerintahan Indonesia, Ketua Peneliti.	UT	20.000.000,-
4	2009	Tracer Study Universitas Terbuka, Anggota Tim Tracer Study UT	Dikti	Rp. 225.000.000,00
5	2010	Pengorganisasian Musrenbangdes di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, Anggota Peneliti	UT	Rp. 20.000.000,00
6	2010	Pengembangan Masyarakat Perdesaan, Studi Kasus: Pengelolaan Kawasan Wisata Dieng Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah), Anggota Peneliti	UT	Rp. 20.000.000,00
7	2011	Implementasi e-Government Dalam Administrasi Pemerintahan Di Kabupaten Banyumas, Anggota Peneliti	UT	Rp. 20.000.000,00
8	2011	Fungsi Penganggaran pada DPRD (Studi Kasus Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah di DPRD Kota Tangerang Selatan, Ketua Peneliti	UT	Rp. 20.000.000,00
9	2011	Pendidikan Politik Oleh Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Kesadaran Politik Masyarakat, Anggota Peneliti	UT	Rp. 20.000.000,00
10	2012	Analisa Pola Layanan Pengaduan Masyarakat (Studi Kasus Sentra Pelayanan Bagian Pelayanan Pengaduan Divisi Protram Mabes Polri, Anggota Peneliti.	UT	Rp. 20.000.000,00
11	2012	Kualitas Layanan Distribusi Buku Materi Pokok Melalui Toko Buku Online Universitas Terbuka, Anggota Peneliti	UT	Rp. 20.000.000,00
12	2012	Pengembangan Model Bahan Ajar Jarak Jauh Pada Matakuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu, Ketua Peneliti	UT	Rp. 30.000.000,00

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp.)
1	2009	Penyuluhan Peningkatan Motivasi di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi	UT	
2	2010	Program Bantuan Sosial (Bansos) UT Bidang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pondok Cabe Udik dan Pondok Cabe Ilir	UT	
3	2012	Penyuluhan Arsip Desa di Kecamatan Pamulang Kota Tangsel	UT	

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
1	2009, Jurnal	Reorganisasi Lembaga Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung	Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja Volume XXXII tahun 2009.
2	2009, Jurnal	Kinerja Badan Perwakilan Rakyat tingkat lokal pada Era Reformasi, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5 No. 2 September 2009.	Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5 No. 2 September 2009.
3	2010, Jurnal	Implementasi Konsep Akuntabilitas Politik di Daerah Pemilihan Kota Depok (Pertanggungjawaban Anggota DPRD kepada Konstituen), Jurnal Pamong Praja, ISSN 1829-8478, Edisi 17-2010, 2010.	Jurnal Pamong Praja, ISSN 1829-8478, Edisi 17-2010, 2010
4	2011, Poster	<i>Universitas Terbuka's student' participation in given initiations, forum of discussions and task of the Online Tutorial will assist them accomplish their final project</i> , Poster pada 24 th ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt 2011	24 th ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt 2011

5	2011, Poster	<i>The Role of UT in the Development of Professional Archivist in the Context of Government-University Collaboration.</i>	24 th ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt 2011.
6	2012, Prosiding	<i>The Role Higher Institution in Developing Human Resources in Indonesia (A Tracer Study at Universitas Terbuka),</i>	The Procidding of 24 th ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt 2011.
7	2012, Prosiding	<i>A Case Study of The Graduates's Readiness for Employment: Tracer Sudy at Universitas Terbuka.</i>	The procidding of International Conference on Experiences with Link and Match in Higher Education: Results of Tracer Studies Worldwide (EXLIMA International Conference on Experiences with Link and Match in Higher Education: Results of Tracer Studies Worldwide (EXLIMA), 22-23 Oktober 2012
8	2012, Prosiding	Grand Strategi Reformasi Birokrasi dan Road Map MDGs 2015 di Indonesia	Prosiding Seminar Nasional Road Map Menuju MDGs 2015 di Indonesia, ISBN: 978-979-011-696-2.

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional Meraih Keunggulan UT Melalui Peningkatan Kualitas Penelitian, Karya Ilmiah dan Publikasi	Akuntabilitas Pada Lembaga Perwakilan Rakyat di Tingkat Lokal (Kasus Pertanggungjawaban Anggota DPRD Terhadap Masyarakat di Daerah Pemilihan Kota Depok)	2009, UT
2	24th ICDE World Conference on Open and Distance Learning	<i>The Role Higher Institution in Developing Human Resources in Indonesia (A Tracer Study at Universitas Terbuka)</i> , 24 th ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt 2011.	2011, Universitas Terbuka dan 24 th ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt 2011.
3	Seminar Hasil Penelitian UT	Fungsi Penganggaran Pada DPRD	2011, LPPM, UT
3	International Conference on Experiences with Link and Match in Higher Education: Results of Tracer Studies Worldwide (EXLIMA).	<i>A Case Study of The Graduates's Readiness for Employment: Tracer Study at Universitas Terbuka.</i> International Conference on Experiences with Link and Match in Higher Education: Results of Tracer Studies Worldwide (EXLIMA). Bali, 22-23 Oktober 2012	2012, Universitas Indonesia, University of Kassel, German.
4	Seminar Nasional MDGs 2015	Peningkatan Peran Pemerintah dan Masyarakat Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem dan Konservasi di Lingkungan Dieng Plateau	2012, FISIP-UT
5	Seminar Hasil Penelitian UT	Kualitas Layanan Distribusi BMP Melalui Toko Buku Online UT	2012-LPPM-UT
6.	Seminar Hasil Penelitian UT	Pengembangan Model Bahan Ajar Jarak Jauh UT	2012-LPPM UT

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-----	------------	-------	----------------	----------

1	Sistem Pemerintahan Indonesia	2007, Modul 5,6,7,9	200 halaman	Universitas Terbuka
2	Sistem Pemerintahan Desa, Edisi 2	2008, Modul 3 dan 5	90 halaman	Universitas Terbuka
3	Hubungan Pusat dan Daerah,	2008, Modul 1	40 halaman	Universitas Terbuka

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Penerbit
1				
2				
3				
Dst				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi

No.	Jenis Penghargaan Tahun	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-----	-------------------------	-------------------------------	-------

Bio Data Anggota 1
IDENTITAS DIRI

Nama : Ayi Karyana, Drs.,M.Si.
Bidang Keahlian : Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : IIIId / Penata Tk. I
Jabatan Akademik : Lektor
Alamat Surat : Jalan Cabe Raya,Ciputat, Tangerang 15418
Telp./Faks. : (021) 7490941, Ex. 1902
Telp./Faks. : 081284882090
Alamat e-mail : ayi@ut.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
1990	Strata 1	Universitas Terbuka, Jakarta	Administrasi Negara
2005	Strata 2	Universitas Padjadjaran, Bandung	Ilmu Administrasi

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/anggota Tim	Sumber Dana
2007	Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja di UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor	Ketua	UT
2008	Pengaruh Implementasi Kebijakan Anggaran Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten Cianjur	Ketua	UT
2008	Koordinasi dan Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Urusan Pendidikan di Kabupaten Cianjur	Ketua	UT
2009	Kompetensi Tutor Melaksanakan Tutorial Tatap Muka Pada Program S1 PGSD di UPBJJ-UT Banda Aceh (Studi Kasus: Pokjar Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Kota Lhokseumawe)	Anggota	UT
2010	Pengorganisasian Musrenbangdes di Desa Kalongsawah Kec. Jasinga Kabupaten Bogor	Ketua	UT
2011	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka Barat	Ketua	UT
2011	Kebijakan Perencanaan Kota yang Partisipatif dan Komunikatif (Studi Kasus di Kota Pangkalpinang	Anggota	UT

2012	Musrenbang Kecamatan: Kesepakatan Usulan Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan	Ketua	UT
------	--	-------	----

KARYA ILMIAH*

A. Buku/Bab Buku/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2005, Jurnal	Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar	JOM – LPPM UT
2006, Bunga Rampai	Reformasi Konstitusi Setengah Hati (Kasus Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah)	Bunga Rampai FISIP- UT
2009, Bunga Rampai	Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	Bunga Rampai FISIP – UT
2009, Jurnal	Implementasi Pelayanan Publik (Kebijakan, Kompetensi, Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Jurnal Administrasi Publik FISIP- Universitas Nusa Cendana Kupang NTT

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2011	Pengorganisasian Perencanaan Desa: Kajian di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor	UNY Yogyakarta
2011	Ketidakpatutan Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI: Perilaku Fraud	UNY Yogyakarta
2011	<i>Political Fairplay</i> Nasional dan Lokal dalam Pembangunan Demokrasi	FISIP-UT
2012	Reformasi Iklim Organisasi Menuju Administrasi Negara yang Baik (<i>Kajian terhadap iklim organisasi di UPT Kurikulum Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor</i>)	Universitas Slamet Ryadi Surakarta-ASiAN

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

2009	Profesionalisme Guru	Dinas Pendidikan Kota Langsa-PGRI Langsa-UPBJJ UT Banda Aceh	Panitia (Pembina)
2010	Membangun <i>Intellectual Curiosity</i> untuk Meningkatkan Daya Kreatif dan Inovatif. Seminar Wisuda	FISIP-UT	Ketua Sie Acara
2011	Simposium Nasional Ilmuwan Administrasi Negara untuk Indonesia	UNY Yogyakarta	Pembicara
2012	Simposium Nasional	UNISRI	Pembicara

	Ilmuwan Administrasi Negara untuk Indonesia II	Surakarta	
--	---	-----------	--

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2009	Penyuluhan Peningkatan Motivasi	Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi
2010	Program Bantuan Sosial (Bansos) UT Bidang Pengelolaan Sampah	Kelurahan Pondok Cabe Udik dan Pondok Cabe Ilir
2011	Penyuluhan Manajemen Pemerintahan Desa	Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi (Univ,Fak,Jurusan,Lab,studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun ... s.d. ...
Ketua Program Studi	S 1 - Administrasi Pembangunan	1995 - 1998
Ketua Program Studi	S1 - Ilmu Pemerintahan	1998 - 2002
Ketua Program Studi	S1 – Ilmu Administrasi Negara	2007 - 2008
Kepala UPBJJ	UPBJJ - UT Aceh	2008 - 2009

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
(Keppres RI No. 052/TK/Tahun 2006 Tanggal 25 Juli 2006)	Satyalancana Karya Satya X Tahun	Presiden RI

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan
2010-2013	Asosiasi Profesi Pendidikan Jarak Jauh Indonesia (APPJJI)	anggota
2011-2013	Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)	anggota

Anggota Peneliti (2)

Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Anto Hidayat, S.IP, M.Si
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19750714 200112 1 001
5	NIDN	0014077501
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Tangerang, 14 Juli 1975
7	E-mail	hidayat@ut.ac.id

8	Nomor Telepon/HP	081314418808
9	Alamat Kantor	Jalan Cabe Raya,Ciputat, Tangerang 15418
10	Nomor Telepon/Faks	(021) 7490941, Ex. 1907
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= orang; S2= orang.
12. Mata Kuliah yang Diampu		Pengantar Ilmu Pemerintahan
		Manajemen Pelayanan Umum
		Perbandingan Pemerintahan
		Kapita Selekta Manajemen Kepegawaian

E. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Gadjah Mada	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	-
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Ilmu Pemerintahan	-
Tahun Masuk-Lulus	1994/2000	2006/2010	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Perilaku Memilih Aparat Birokrasi Desa Pada Pemilu 1999 di Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang.	Hubungan Pengawasan Masyarakat Dengan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kota Depok Provinsi Jawa Barat.	-
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. Haryanto, MA	Prof. Dr. Aries Djaenuri	-

F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2011	Kemutakhiran Substansi Bahan Ajar Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT	LPPM-UT	Rp. 10.000.000,00
2	2011	Implementasi <i>e-Government</i> dalam Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah	LPPM-UT	Rp. 20.000.000,00
3	2012	Penelitian Kelembagaan Evaluasi Kualitas Pelayanan pada Puslata Universitas Terbuka	LPPM-UT	Rp. 10.000.000,00
4	2012	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan	LPPM-UT	Rp. 20.000.000,00
5	2012	Pengembangan Model Bahan Ajar Jarak Jauh Pada Mata Kuliah IPEM4318 Sistem Kepartaian dan Pemilu	LPPM-UT	Rp. 30.000.000,00
6	2012	Musrenbang Kecamatan: Kesepakatan Usulan Skala prioritas Pembangunan	LPPM-UT	Rp. 30.000.000,00

G. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp.)
1	2010	Program Bantuan Sosial Universitas Terbuka Kepada Masyarakat Tangerang Selatan	LPPM-UT	-
2	2011	Program Literasi Media Untuk Sekolah Dasar Kec. Pamulang, Kec. Gunung Sindur, dan Kecamatan Parung	LPPM-UT	-
3	2011	Penyuluhan tentang Administrasi Pemerintahan Desa Kec. Cipanas Kabupaten Cianjur	LPPM-UT	-
4	2011	Program Penghijauan dan Penataan Lingkungan Situ Gintung, Tangerang Selatan	LPPM-UT	-
5	2012	Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buaran, Serpong, Tangerang Selatan	LPPM-UT	-
6	2012	Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Kec. Pamulang, Tangerang Selatan	LPPM-UT	-

H. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
1	2009	Kajian Kemutakhiran Substansi Bahan Ajar Perguruan Tinggi Jarak Jauh	Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemendikbud
2	2011	<i>The Role of Online Tutorial in Civic Education to Enhance Student Engagement to Citizenship</i>	Prosiding Konferensi ICDE ke 24, <i>International Council for for Open and Distance Learning</i> – Universitas Terbuka
3	2011	Peran Masyarakat dalam Membangun Akuntabilitas Publik di Puskesmas	Prosiding Simposium Nasional II, AsIAN – Universitas Slamet Riyadi Surakarta
4	2012	Dimensi Kependudukan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan	Prosiding Seminar Nasional 2012, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

H. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Konferensi ICDE ke 24, <i>International Council for for Open and Distance Learning</i> - Universitas Terbuka	<i>The Role of Online Tutorial in Civic Education to Enhance Student Engagement to Citizenship</i>	2-5 Oktober 2011, Nusa Dua Bali
2	Seminar Penelitian LPPM-UT	Implementasi <i>E-Government</i> dalam Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Banyumas	2012, UT <i>Covention Center</i> , Universitas Terbuka
3	Simposium Nasional Ke 2 Ilmuwan Administrasi Negara untuk Indonesia	Peran Masyarakat dalam Membangun Akuntabilitas Publik di Puskesmas	2012, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
4	Seminar Nasional FISIP-UT 2012	Dimensi Kependudukan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan	2012, FISIP-UT

I. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Buku Materi Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia	2007	366 hal	Universitas Terbuka
2	Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Manajemen Pemerintahan, dalam Buku Materi Pokok Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia	2007	58 hal./599 hal	Universitas Terbuka

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Penerbit

K. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

L. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi)

No.	Jenis Penghargaan Tahun	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

